

Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.

Juli 2013.

Etika Profesi

**Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan
dalam Perspektif Hukum Positif**

Bandung, Juli 2013.

**Etika Profesi:
Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan
dalam Perspektif Hukum Positif**

Penulis	Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH
Kata Pengantar	Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si.
Editor	Muhamad Haerun., SH., MH. Friska Bara Nurrahmat., SH.
Desain sampul	Tim Kreatif Penerbit.
Setting / layout	Tim Kreatif Penerbit.

Cetakan pertama Agustus 2013.
ISBN:xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
tidak diperkenankan untuk memperbanyak isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Sanksi pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44
Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Ada tiga perkara pada diriku, aku tidak menyebutkannya kecuali supaya dapat diambil pelajaran, Pertama aku tidak mendatangi penguasa (Sulthan) kecuali jika diundang. Kedua, Aku tidak masuk pada dua orang kecuali setelah keduanya mempersilahkanku masuk di antara mereka. Ketiga, tidaklah aku menyebutkan seseorang setelah dia pergi dari sisiku kecuali kebaikan – kebaikan”

(Al Ahnaf bin Qais)

Rasulullah SAW bersabda: *“bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok.”*

*Aristoteles menganalisis bahwa kebaikan tertinggi secara niscaya haruslah sesuatu yang final. Final itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya, *Nicomachean Ethics*, adalah, “Apa yang selalu dipilih sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah sebagai sarana untuk sesuatu yang lain disebut final dalam arti tanpa kualifikasi. Bahwa kebaikan tertinggi, terletak pada etika tertinggi. (Penulis, 2013)*

Buku ini penulis persembahkan untuk:

*Mengenang ayahanda; H.N. Sukanda (alm) tercinta yang penulis
banggakan;
Ibunda terncinta; Ny. Hj. Ida;
Istriku, Anak-anaku, Cucu-cucuku, serta Menantu tercinta. Begitu bahagia
selalu bersama kalian.*

Pengantar Menuju Gerbang Etika

Buku ini akan membicarakan lebih dalam mengenai etika terapan (*applied ethic*). Alasannya, karena sebagian besar dari materi yang dibahas dalam buku ini merupakan bahan-bahan pembahasan dari etika terapan (khususnya dalam setiap bidang profesi kehidupan sehari-hari). Istilah “etika terapan” kedengarannya masih baru, tapi isinya bukanlah sesuatu baru sama sekali dalam sejarah filsafat moral. Sudah sejak **Plato** dan **Aristoteles** (filsuf Yunani Kuno) terdapat penekanan yang jelas bahwa etika merupakan filsafat praktis yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia, dengan memperlihatkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.

Kemudian pada abad pertengahan **Thomas Aquinas** melanjutkan tradisi filsafat praktis ini dengan menerapkannya dibidang teologi moral. Demikian juga dalam dunia modern, orientasi praktis dan etika berlangsung terus. Pada awal zaman modern muncul etika khusus (*ethica specialis*), yang membahas masalah etis tentang suatu bidang tertentu (seperti keluarga dan negara). Etika terapan yang kita kenal sekarang sebenarnya tidak lain dari etika khusus, yang bermaksud menyorot hal-hal praktis kehidupan manusia. Situasi yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama tersebut justru mengalami perubahan selama enam dasawarsa pertama abad ke-20. Pada masa-masa itu sifat praktis dari etika hampir terlupakan, Namun sejak tahun 1960-an situasinya berubah, perhatian pada etika kembali mendapat tempat penting. Bahkan sekarang dapat dikatakan bahwa filsafat moral, khususnya dalam bentuk etika terapan, mengalami masa suatu kejayaan.

Seperti yang akan penulis uraikan dalam buku secara panjang lebar, bahwa kata” etika” berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*”, yang berarti: *adat kebiasaan, cara berpikir; akhlak, sikap, watak, cara bertindak*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa pengertian “*etika*” dapat dibedakan dengan tiga arti yakni: *Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; Nilai mengenai benar dan salah, yang dianut suatu golongan masyarakat*. Dengan pembedaan tiga pengertian tersebut maka kita mendapatkan pengertian yang lebih lengkap mengenai apa itu etika, sekaligus kita lebih mampu memahami pengertian etika yang seringkali muncul dalam pembicaraan sehari-hari, baik secara lisan maupun yang tertulis diberbagai media.

Pengertian ”*etika*” melebihi dari pengertian “*moral*”, moral dalam hal ini dapat diartikan sebagai *sistem nilai yang merupakan*

pegangan atau pedoman tingkah laku baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (azas-azas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk), yang begitu saja diterima dalam masyarakat-yang seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan methodis. Dalam arti ini etika sama dengan filsafat moral. Kuliah etika adalah suatu studi sistematis dan methodis tentang moralitas, suatu pembahasan filosofis tentang ajaran-ajaran moral. Jadi etika sebagai ilmu menginginkan pemahaman rasional tentang mengapa sesuatu disebut baik atau buruk secara moral.

Dalam pembicaraan sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis, seringkali kita dengar kata etika dan etiket dicampuradukkan begitu saja. Mungkin karena kedua kata ini hampir sama, maka dalam pemakaian sehari-hari sering keduanya dimengerti sama, padahal antar keduanya terdapat perbedaan sangat mendasar. Etika bukanlah sekedar etiket. Etika adalah menyangkut moral, sedangkan etiket menyangkut sopan santun atau tata krama.

Walaupun terdapat persamaan arti antara etika dan etiket, namun terdapat juga perbedaan mendasar antara keduanya:

- a) Etiket menyangkut cara suatu perbuatan dilakukan, sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Ketika hendak melakukan suatu perbuatan, etiket memperhatikan cara yang tepat, yang sesuai dengan kebiasaan dalam kalangan tertentu. Umpamanya, kalau kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain, kita hendaknya menyerahkan dengan tangan kanan. Kita melanggar etiket apabila kita menyerahkan dengan tangan kiri. Beda dengan etiket, etika tidak hanya sekedar menyangkut cara suatu perbuatan hendak dilakukan. Etika menegaskan sesuatu tentang perbuatan itu sendiri, bahwa suatu perbuatan harus atau tidak boleh dilakukan. Mengembalikan barang pinjaman adalah sesuatu yang harus, dan ini adalah masalah etika: sedang cara bagaimana mengembalikan barang pinjaman itu adalah masalah etiket;
- b) Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika tetap berlaku, dengan atau tanpa kehadiran orang lain. Etiket hanya berlaku atau perlu diperhatikan apabila ada orang lain yang menyaksikan atau dapat melihat perbuatan kita;
- c) Etiket bersifat relatif, sedangkan etika lebih bersifat absolut. Etiket bersifat kedaerahan, di mana hal-hal yang dianggap tidak sopan di suatu daerah biasa saja dianggap sopan di daerah lain. Memanggil orang tua dengan menyebut nama aslinya biasa sangat tidak sopan disuatu daerah, sedangkan di daerah atau

kebudayaan lain malah dianggap sebagai ungkapan rasa hormat dan keakraban. Etika tidak demikian. Norma-norma seperti, jangan membunuh atau mencuri merupakan prinsip etika yang berlaku umum;

- d) Etiket lebih pada penampilan lahiriah, sedangkan etika lebih pada penampilan rohaniah atau batiniah. Kita mengenal ungkapan “etiket bertelepon”, “etiket menerima tamu” dan sebagainya. Etika tidak terutama memperhatikan bahkan sama sekali tidak memperhatikan segi-segi lahiriah seperti itu, melainkan motif atau maksud yang melandasi tindakan etis.

Dengan perbedaan-perbedaan penting di atas maka sering cukup fatal apabila begitu saja hal-hal yang sebenarnya merupakan lingkup etika dimasukkan saja dalam lingkungan etiket; dan sebaliknya. Orang yang sebenarnya telah melanggar etika atau hanya sebagai pelanggaran etiket, dianggap sebagai pelanggaran etika.

Adalah suatu kenyataan sekarang ini bahwa kita hidup dalam zaman yang semakin *pluralistik*, tidak terkecuali dalam hal moralitas. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang dari suku, daerah lapisan sosial dan Agama yang berbeda. Pertemuan ini semakin diperbanyak dan diperluas oleh kemajuan yang telah dicapai dalam dunia teknologi informasi, yang telah mengalami perkembangan sangat pesat. Dalam pertemuan langsung dan tidak langsung dengan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat kita menyaksikan atau berhadapan dengan pelbagai pandangan dan sikap yang, selain memiliki banyak kesamaan, memiliki juga banyak perbedaan bahkan pertentangan. Masing-masing pandangan mengklaim diri sebagai pandangan yang paling benar dan sah. Kita mengalaminya sepertinya kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi. Berhadapan dengan situasi, semacam ini, kita akhirnya bertanya, tapi yang kita tanyakan bukan hanya apa yang merupakan kewajiban kita dan apa yang tidak, melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban.

Ciri lain yang menandai zaman kita adalah timbul masalah-masalah etis baru, terutama yang disebabkan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu-ilmu biomedis. Telah terjadi manipulasi genetik, yakni campur tangan manusia atas perkembangbiakan gen-gen manusia. Masalah *cloning* dan penciptaan manusia super sangatlah mengandung masalah-masalah etis seru dalam kehidupan manusia. Bagaimana sikap kita menghadapi perkembangan seperti ini? Disinilah kajian pertanggungjawaban etika diperlukan.

Ciri berikutnya yang menandai zaman kita adalah adanya suatu kepedulian etis yang semakin universal. Diberbagai tempat atau

wilayah di dunia kita menyaksikan gerakan perjuangan moral untuk masalah-masalah bersama umat manusia. Selain pergerakan-pergerakan perjuangan moral yang terorganisir seperti dalam bentuk kerjasama antar Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, antar Dewan Perwakilan Rakyat dari beberapa negara atau Serikat-serikat Buruh, dan sebagainya, juga kita dapat menyaksikan adanya suatu kesadaran moral universal yang tidak terorganisir tapi terasa hidup dan berkembang di mana-mana. Ungkapan-ungkapan kepedulian etis yang semakin berkembang ini tidaklah mungkin terjadi tanpa di latarbelakangi oleh kesadaran moral yang universal. Gejala yang paling mencolok tentang kepedulian etis adalah Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi Manusia, Yang diproklamirkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (UNO) pada Tanggal 10 Desember 1948. Dengan kepedulian etis yang universal ini, maka pluralisme moral pada bagian pertama di atas dapat menjadi persoalan tersendiri.

Kita sekarang ini hidup dalam masa *transformasi* masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan yang terus terjadi itu muncul dibawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Yang dimaksud gelombang modernisasi disini bukan hanya menyangkut barang atau peralatan yang diproduksi semakin canggih, melainkan juga dalam hal cara berpikir yang telah berubah secara radikal. Ada banyak cara berpikir yang berkembang, seperti *rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, konsumerisme, pluralisme religius*, serta cara berpikir dan pendidikan modern yang telah banyak mengubah lingkungan budaya, sosial dan rohani masyarakat kita.

Proses perubahan sosial budaya dan moral yang terus terjadi, tidak jarang telah membawa kebingungan bagi banyak orang atau kelompok orang. Banyak orang merasa kehilangan pegangan, dan tidak tahu harus berbuat atau memilih apa. Situasi seperti ini tidak jarang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai jawaban atas kebingungan tadi. Ada cukup banyak orang yang terombang-ambing mengikuti tawaran yang masing-masing mempunyai daya tarik sendiri itu. Disini etika dapat membantu orang untuk sanggup menghadapi secara kritis dan objektif berbagai ideologi yang muncul. Pemikiran kritis dapat membantu untuk membuat penilaian rasional dan objektif, dan tidak mudah terpancing oleh berbagai alasan yang tidak mendasar. Sikap kritis yang dimaksud disini, bukan suatu sikap yang begitu saja menolak ide-ide baru atau juga begitu saja menerimanya, melainkan melakukan penilaian kritis untuk memahami sejauh mana ide-ide baru itu dapat diterima dan sejauh mana harus dengan tegas ditolak.

Etika juga diperlukan oleh para agamawan untuk tidak menutup diri terhadap persoalan-persoalan praktis kehidupan umat manusia. Di satu pihak Agama menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, namun sekaligus diharapkan juga mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan hampir disegala bidang. Walau etika tidak dapat menggantikan Agama, namun etika tidaklah bertentangan dengan Agama, dan bahwa Agama memerlukan etika. Alasan yang biasa dikemukakan bagi pentingnya etika untuk Agama adalah sebagai berikut;

1. Masalah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu Tuhan, terutama seperti tertuang dalam kitab suci keagamaan. Banyak ahli Agama, bahkan seagama sekalipun, sering berbeda pendapat tentang apa yang sebenarnya mau diungkapkan dalam wahyu itu;
2. Mengenai masalah-masalah moral yang baru, yang tidak langsung dibahas dalam wahyu itu sendiri. Bagaimana menanggapi dari segi Agama masalah-masalah moral yang pada waktu wahyu diterima belum dipikirkan. Untuk mengambil sikap yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap masalah-masalah yang timbul kemudian, diperlukan etika. Disini etika dapat dimengerti sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya yang rasional untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Usaha seperti ini tidak bertentangan dengan iman karena akal budi juga merupakan anugerah besar dari sang Pencipta kepada umat manusia.

Sudah dalam waktu yang lama etika tampil dalam bentuk etika umum, yang membahas secara teoritis-filosofis perihal baik-buruknya perbuatan manusia dari sudut pandang etis. Akan tetapi, kira-kira empat dasawarsa terakhir perhatian terhadap filsafat moral (etika) berubah drastis. Etika tampil dalam bentuk etika terapan atau kadang disebut filsafat terapan.

Pada awal abad 20 di kawasan berbahasa Inggris, khususnya di United Kingdom dan Amerika Serikat etika dipraktekkan sebagai "*metaetika*". Ini adalah suatu aliran dalam filsafat moral yang tidak menyelidiki baik buruknya perbuatan manusia, melainkan "bahasa moral" atau ungkapan-ungkapan manusia tentang baik dan buruk. Aliran meta etika merupakan filsafat moral yang mendominasi enam dekade pertama abad ke-20. Baru mulai akhir 1960-an terlihat suatu tendensi lain. Timbul perhatian yang semakin besar terhadap etika.

Sekitar saat itu etika mulai meminati masalah-masalah etis yang konkrit. Etika turun dari tempatnya yang tinggi, dan mulai membumi.

Perubahan tersebut dapat dikatakan dipicu oleh beberapa faktor yang timbul serentak. Diantara beberapa faktor itu dapat disebut faktor penting *pertama* adalah perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam sektor ilmu-ilmu biomedis. Perkembangan pesat bidang ini telah menimbulkan banyak persoalan etis yang besar. Faktor penting *kedua* adalah terciptanya semacam “iklim moral” yang mengundang minat baru untuk etika. Iklim baru yang dimaksud berupa munculnya gerakan hak diberbagai bidang, yang secara khusus telah mengundang peran aktual dari etika itu sendiri.

Dalam sejarah perjalanan etika atau filsafat moral, dapat dikatakan bahwa belum pernah ada perhatian yang begitu besar terhadap etika seperti halnya sekarang ini. Sekedar memberikan gambaran besarnya perhatian tersebut, di sini dituliskan beberapa fakta yang ada, sebagai berikut;

1. Di banyak tempat diseluruh dunia setiap tahun diadakan kongres dan seminar tentang masalah-masalah etis;
2. Telah didirikan cukup banyak institut, di dalam maupun di luar kalangan perguruan tinggi, yang khusus mempelajari persoalan-persoalan moral, kerap kali dalam kaitan dengan bidang ilmiah tertentu (ilmu kedokteran, hukum, ekonomi atau yang lainnya);
3. Terutama di Amerika Serikat, etika dalam salah satu bentuk sering kali dimasukkan dalam kurikulum di Perguruan Tinggi;
4. Membanjirnya publikasi mengenai etika terapan yang tidak pernah terpikirkan beberapa dekade yang lalu. Ada cukup banyak majalah ilmiah yang membahas salah satu aspek etika terapan. Seperti: *Philosophy and Publik Affairs*, *Journal of Medical Ethics* dll;
5. Pada dekade-dekade terakhir ini tidak jarang jasa ahli etika diminta untuk mempelajari masalah-masalah yang berimplikasi moral.

Penampilan baru etika dalam bentuk etika terapan sekarang ini mempunyai konsekuensi juga untuk etika teoritis atau etika umum. Perdebatan tentang masalah-masalah kongkrit akhirnya akan memperjelas, menguji dan mempertajam juga prinsip-prinsip moral yang umum. Perjumpaan dengan praktek akan memberikan banyak masukan berharga yang dapat dimanfaatkan oleh refleksi etika teoritis. Sebaliknya, etika terapan sangat membutuhkan bantuan dari teori etika, sebagai pegangan baginya dalam memasuki pergumulan dengan masalah-masalah praktis. Di sini ia mempergunakan prinsip-prinsip dan

teori moral yang diharapkan sudah mempunyai dasar yang kukuh. Apa yang dihasilkan oleh etika terapan tidaklah bisa diandalkan kalau teori etika yang ada dibelakangnya tidak berbobot dan bermutu.

Dua wilayah besar yang disoroti atau mendapat perhatian khusus dan serius di dalamnya, yakni wilayah profesi dan wilayah masalah. Etika kedokteran, etika politik, etika bisnis, dan sebagainya, merupakan wilayah profesi. Penggunaan tenaga nuklir, pembuatan, pemilikan, penggunaan senjata nuklir, pencemaran lingkungan hidup, diskriminasi ras merupakan wilayah masalah. Cabang etika terapan yang paling banyak mendapat perhatian dalam zaman kita sekarang ini dapat disebut dari sudut / wilayah profesi, yakni: etika kedokteran dan etika bisnis. Dari wilayah masalah masalah dapat disebut: etika tentang perang dan damai dan etika lingkungan hidup.

Cara lain untuk membagikan etika terapan adalah dengan membedakan antara "*makroetika*" dan "*mikroetika*". *Makroetika* membahas masalah-masalah moral pada skala besar. Suatu masalah disebut *makroetika* apabila masalah itu menyangkut suatu bangsa seluruhnya bahkan seluruh umat manusia (seluruh dunia). Ekonomi dan keadilan; lingkungan hidup, dan alokasi sarana-sarana pelayanan kesehatan dapat digolongkan sebagai contoh-contoh dari *makroetika*.

Selain *makroetika* yang sudah penulis jelaskan di atas, ada juga yang disebut sebagai "*Mikroetika*", sifat dari etika ini membicarakan pertanyaan-pertanyaan etis di mana individu terlibat, seperti kewajiban dokter terhadap pasiennya atau kewajiban pengacara terhadap kliennya. Kadang diantara *makroetika* dan *mikroetika* disisipkan lagi jenis etika terapan yang ketiga, yang disebut *mesoetika* (*meso*=madya), yang menyoroti masalah-masalah etis yang berkaitan dengan suatu kelompok atau profesi, seperti kelompok ilmuwan, profesi wartawan, pengacara dan sebagainya.

Pembagian lain etika terapan adalah pembedaan antara etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial membahas kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat. Namun pembagian ini banyak diragukan relevansinya, karena sebutan untuk manusia perorangannya pun, adalah dapat disebut sebagai makhluk sosial, sehingga tidak bisa dibedakan antara etika individual dan etika sosial.

Etika terapan mesti bekerjasama dengan disiplin-disiplin ilmu-ilmu lain. Kerjasama ini mutlak diperlukan, karena dia harus membentuk pertimbangan tentang bidang-bidang yang sama sekali diluar keahliannya. Seorang etikawan akan sulit baginya memberikan pertimbangan moral yang dapat dipertanggungjawabkan untuk suatu masalah medis yang sama sekali tidak dimengertinya dengan baik.

Dia membutuhkan penjelasan atau ulasan yang memadai dan lengkap mengenai pilihan-pilihan tindakan medis beserta berbagai argumen dibelakangnya. Dan ini hanya akan diperoleh dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang itu.

Dalam membahas tentang etika, dalam hal ini kita perlu menggunakan pendekatan *multidisipliner* dan pendekatan *interdisipliner*. Keduanya sama-sama merupakan pendekatan yang membuka pemahaman yang lebih luas dan mendalam atas suatu masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan *multidisipliner* adalah usaha pembahasan tentang tema yang sama oleh pelbagai ilmu, sehingga semua ilmu itu memberikan sumbangannya yang satu disamping yang lain. Setiap ilmuwan dari satu disiplin ilmu akan berusaha memberi penjelasan yang dapat dipahami juga oleh ilmuwan dari bidang lain.

Kemudian pendekatan *multidisipliner* merupakan usaha menyoroti suatu masalah tertentu dari berbagai seginya. Dalam melakukan hal ini perspektif setiap ilmu tetap dipertahankan dan tidak harus melebur dengan perspektif ilmiah yang lainnya. Di sini tidak tercapai suatu pandangan terpadu, yang memang tidak dimaksudkan disini. Yang dihasilkan hanyalah pendekatan dari berbagai arah yang dipusatkan pada tema yang sama.

Pendekatan *Indisipliner* dijalankan dengan lintas disiplin di mana semua ilmu yang ikut serta meninggalkan pandangan yang menyeluruh. Hasil yang diperoleh dari kerjasama ini adalah suatu produk yang melampaui segi ilmiah masing-masing peserta. Dalam kenyataannya *interdisipliner* agak sulit dilaksanakan. Dan walaupun pendekatan *multidisipliner* juga bukan hal yang tidak sulit namun pendekatan itu lebih realistis dilaksanakan.

Selain kedua pendekatan di atas, ada juga yang disebut sebagai pendekatan *kasuistik*, pendekatan ini merupakan usaha memecahkan kasus-kasus konkrit dibidang moral dengan menerapkan prinsip-prinsip etika umum. Pembahasan kasus merupakan cara yang sangat cocok dalam etika terapan, dan mengungkapkan sesuatu tentang kekhususan argumentasi dalam etika. Pendekatan kasuistik diakui sebagai metode yang efisien untuk mencapai kesepakatan di bidang moral. Biasanya, kalau dimulai dari teori akan sulit mencapai suatu kesepakatan. Penalaran moral memang berbeda dengan penalaran matematis, yang selalu dilakukan dengan cara yang sama, kapan saja dan di mana saja, tak terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar.

Dengan pendekatan *kasuistik* ini, sifat penalaran moral menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut;

1. Di suatu pihak *kasuistik* mengandaikan secara implisit bahwa *relativisme* moral tidak bisa dipertahankan. Jika setiap kasus

mempunyai kebenaran etis sendiri, maka pendekatan *kasuistik* tidak perlu lagi. *Kasuistik* timbul karena ada keyakinan umum bahwa prinsip-prinsip etis itu bersifat universal dan tidak relatif saja terhadap suatu keadaan konkret;

2. Prinsip-prinsip etis tidak bersifat absolut begitu saja, dan tidak peduli dengan situasi konkret. Sebagaimana arti sebuah kata atau kalimat bisa berubah karena konteksnya, demikian juga sifat-sifat suatu masalah etis bisa berubah karena situasi khusus yang menandai kasusnya. Etika situasi sangat memperhatikan keunikan setiap situasi. Faktor-faktor spesifik yang menandai suatu situasi tertentu bisa sangat mempengaruhi penilaian terhadap suatu kasus. Semua kasus tidak sama dan ketidaksamaan ini penting diperhitungkan dalam rangka menerapkan suatu prinsip etika yang berlaku umum.

Etika terapan dapat membantu untuk mengangkat pertimbangan dan keputusan moral dari taraf subyektif serta emosional ke taraf obyektif dan rasional. Pandangan disebut objektif apabila dalam penalarannya lepas dari faktor-faktor yang hanya penting untuk beberapa orang; tidak memihak atau memenangkan kepentingan pihak tertentu; tidak berprasangka atau bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Akhirul kata, penulis berharap semoga buku yang sedang saudara baca ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk anda yang sedang menjalankan profesinya masing-masing dalam kehidupannya.

Itulah sedikit gambaran eksistensi buku ini,

Selamat menelusuri jejak pemikiran dalam buku ini:

Bandung Juli 2013.

Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ya Allah,,, Segala puji bagi-MU, yang memberiku kekayaan disaat aku miskin, Segala puji bagi-MU, yang telah memberi kekuatan disaat aku lemah, Segala puji bagi-MU, yang telah memberi petunjuk disaat dalam bingung, Segala puji bagi-MU, yang telah menyembuhkanku dari sakit. Sesungguhnya aku dalam kegelapan yang berlipat-lipat, Segala puji bagi-MU, yang telah mengeluarkanku menuju cahaya, Segala puji bagi-MU, yang telah memberiku pendengaran dan penglihatan.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga, atas selesainya buku yang diberi judul: **Etika Profesi: Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif**. Buku ini merupakan buku I dengan tema etika, mengapa dikatakan buku I, sebab saat ini penulis sedang konsentrasi untuk menggarap buku II, yakni sebagai kelanjutan dari buku I ini namun pembahasannya lebih khusus kepada Etika Profesi Hukum. Buku II yang sedang penulis garap tersebut, penulis beri judul: **Memahami Etika Profesi Hukum; Dasar-Dasar Etika Bagi Penegak Hukum**.

Buku ini berbicara tentang etika secara umum, yakni etika dalam setiap bidang kehidupan. Tema yang akan dibahas adalah Etika profesi, tema ini sangat memiliki arti dan peran penting dalam kehidupan manusia karena sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (*okupasi*) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Mengapa etika sangat penting dalam setiap bidang kehidupan?, dalam buku ini penulis berpendapat bahwa; Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan

manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Maka dengan demikian sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab, Bab Satu; Mempelajari Etika Sebagai Sebuah Ilmu Terapan. Penulis membahas tentang Pengertian dan Istilah Etika; serta, Teori Etika, yang terdiri dari; Teori Idealisme-Etis; Teori Dentologi Etis; Teori Teologisme Etis. Kemudian pada Bab Dua, penulis membahas tentang mengenai Tokoh Etika Profesi. Yang penulis bahas adalah tokoh etika Yunani, Barat, sampai tokoh etika Islam. Pada Bab Tiga, penulis membahas tentang; Melintasi Etika Profesi Kehidupan Dengan Pisau Analitis Etika Keilmuan. Dalam bab ini, penulis membahas berbagai macam etika profesi dalam setiap kehidupan manusia, yang penulis tekankan kepada etika seorang birokrat. Pembahasan dalam bab ini, penulisawali dengan Prospek Etika Keilmuan Untuk Etika Profesi; Etika Profesi Kehidupan Manusia, kemudian membahas etika profesi yang terpenting salah satunya adalah etika kedokteran dan kebidanan. Kemudian pada bab empat, penulis membahas mengenai; Merancang Model Pelayanan Publik Untuk Pemerintahan Daerah: Pisau Analisis Etika Administrasi Negara. Pada bab lima, penulis berusaha untuk mengantarkan pembaca kepada buku etika II yang akan segera terbit, pembahasan dalam bab lima ini, penulis menguraikan tentang bagaimana etika terapan dalam penegakkan hukum.

Buku etika I ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis menyadarinya, kalau penulis tanpa bantuan berbagai pihak tidak bisa menerbitkan buku ini. Maka dengan demikian, dalam kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sangat dalam kepada Ayahku tercinta; H. N.

Sukanda (alm)., Ibunda tersayang; Ny. Hj. Ida. Yang telah mengarahkan penulis kepada jalan kehidupan yang seperti sekarang ini. Dalam penulisan buku ini yang lebih mendukung adalah Istri dan Anak-anak penulis, Untuk istriku penggenggam hidupku ini; Imas Rostini. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungannya, Kepada Anak-anaku tersayang; Friska Bara Nur rahmat dan Muhamad Alif Rahmat. Penulis menghaturkan terimakasih atas waktunya. Lanjutkan cita-citamu, kelak kau akan melebihi ayah. Untuk istriku tercinta dan anak-anaku, terimakasih atas dukungan kalian, tanpa adanya dukungan kalian, mungkin buku ini tidak akan pernah selesai. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si. Yang berkenan untuk memberikan kata pengantar dalam buku ini.

Akhirul kalam, Penulis menyadari buku ini tidak akan memiliki arti tanpa dukungan seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaiannya. Pintu seluas luasnya terbuka bagi semua pihak yang memiliki saran, komentar, masukan atau bahkan kritikan, dan penulis akan menjadikannya sebagai berkah dari Allah untuk bekerjasama dan berkarya bersama mewujudkan nilai-nilai yang arif dan bijaksana dalam penyempurnaan buku ini.

Semoga Allah SWT meridhai buku ini
Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Bandung, Juli 2013

Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si.
(Rektor Universitas Majalengka)

Pemahaman konsep etika yang lebih dalam, tentunya akan sampai kepada titik bahwa Etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, jadi untuk memperoleh pemahaman tentang etika secara menyeluruh kita hendaknya mengkaji kembali perkembangan ilmu sejak awal. Berikut adalah berbagai macam aliran yang menjadi landasan dari etika: *Naturalisme*, paham ini berpendapat bahwa sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori yang sangat metafisis. *Individualisme*; setiap individu berhak menentukan hidupnya sendiri, dan memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihan batinnya dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun juga,. *Hedonisme*; yaitu bahwa bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. *Eudaemonisme*; paham ini mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi. *Utilitarianisme*; suatu perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat atau kegunaan, yang berarti memberikan kita sesuatu yang baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang buruk. *Idealisme*; timbul dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat.

Dalam hidup bermasyarakat, faktor-faktor yang mendorong perilaku seseorang itu berpengaruh secara interaktif. Pilihan tindakan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan usia, pengalaman yang diperoleh dari orang lain, kondisi sosial ekonomis, dan pendidikan akhlak yang pernah dikenyam seseorang. Namun, tahap-tahap pertimbangan moral yang mewujudkan perilaku seseorang masih bisa kita lacak secara teoritis yang meliputi penilaian *sunderesis* (pemeliharaan), penilaian tentang ilmu moral, penilaian khusus *non-personal*, penilaian khusus pribadi, dan penilaian atas pilihan tindakan. Nilai-nilai moral suatu masyarakat bukan sekedar keyakinan masing-masing anggotanya, melainkan merupakan bagian dari harta benda rohani masyarakat itu. Nilai-nilai tersebut ikut menentukan identitas dan pola tindakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Di berbagai aspek masalah sosial dan masalah kesejahteraan umum, hampir semua

keputusan akan mempunyai akibat-akibat etis yang dalam jangka panjang akan terasa begitu penting. Jadi, kesediaan seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa memperkokoh kemampuan dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan moral pada gilirannya merupakan landasan yang paling kuat bagi setiap dimensi pembangunan. Diskusi dan kritik etis adalah unsur penting dalam mencari orientasi normatif di tengah perubahan sosial yang sangat cepat.

Buku dengan tema Etika ini, ditulis oleh seorang birokrat pemerintahan sekaligus merangkap sebagai seorang dosen, pemerhati masalah hukum, peneliti dan seorang penulis di berbagai media. Tentunya buku ini, akan memberikan manfaat dan nilai guna yang sangat besar bagi perkembangan profesi dalam setiap bidang kehidupan saat ini. Kenapa buku ini membahas tentang etika?, apa yang menjadi alasan penulis. Marilah kita ungkap jawabanya, apa yang tersimpan dari essensi buku ini.

Dalam pergaulan kita atau di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar itu Etika dan Moral (namun etiket mungkin bagi sebagian orang tidak pernah disebutkan), pada kenyataannya hanya sebagian orang yang dapat menerapkan Etika dan Moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lebih lanjut membahas pentingnya etika akan lebih baik jika kita mengerti apa itu etika dan moral. Etika merupakan Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan moral Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata 'moral' yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat.

Bila kita membandingkan dengan arti kata 'etika', maka secara etimologis, kata 'etika' sama dengan kata 'moral' karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata 'moral' sama dengan kata 'etika', maka rumusan arti kata 'moral' adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu 'etika' dari bahasa Yunani dan 'moral' dari bahasa Latin. Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoba itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan

norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.

Persoalannya adalah mengapa Etika dan moral penting? Karena Dalam dunia sehari-hari, bisnis, sekolah, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Harus di dukung oleh sikap dalam tutur kata yang baik dan tingkah laku (perbuatan) yang baik pula, karena pada dasarnya seseorang akan melihat cara kita berbicara dan tingkah laku kita saat berbicara dengan lawan bicara kita. Misal: jika kita tidak dapat bertutur kata dengan baik dalam dunia bisnis, rekan bisnis kita pasti akan merasa kecewa karena semula ingin bekerja sama dengan anda, karena melihat dari segi tutur kata atau tingkah laku anda kurang baik, itu akan menjadi minus bagi anda di mata rekan bisnis anda.

Begitu juga dalam bermasyarakat, jika dalam lingkungan perumahan atau sekitar rumah anda, anda tidak dapat menjaga etika dan moral, secara sikap dan tingkah laku maka dalam kehidupan bermasyarakat anda akan mendapatkan predikat yang kurang baik.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan betapa pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari karena jika tanpa etika dalam dunia pekerjaan dan melakukan aktifitas yang berdialog dengan lawan bicara tanpa mempunyai etika dan moral yang kurang bagus, akan terasa sekali dampaknya pada diri kita sendiri, jika dengan etika dan moral yang bagus seseorang akan merasa nyaman berdialog dengan kita jika tanpa di dukung oleh etika yang minim dan moral yang tidak bagus, seseorang akan segan untuk berdialog atau berkomunikasi dengan kita. Maka dengan demikianlah buku ini ditulis dan membahas tema utamanya adalah etika.

Selamat membaca.....

Majalengka, 27 Juli 2013.

**Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si.
(Rektor Universitas Majalengka)**

DAFTAR ISI

Pengantar Menuju Gerbang Etika	v
Kata Pengantar Penulis	xix
Kata Pengantar: Prof. Dr. Dey Ravena., SH., MH.	xxii
Bab Satu	1
Mempelajari Etika Sebagai Sebuah Ilmu Terapan	1
A. Pengertian dan Istilah Etika.	1
1. Etika, Etiket, moral dan Moralitas.	1
2. Etika Sebagai Cabang Filsafat Ilmu.	25
3. Pendefinisian Etika Profesi.	34
4. Sejarah Etika	36
5. Sejarah Akhlak Sebagai Sebuah Ilmu Etika.	44
6. Objek dan Kajian Etika.....	49
a. Objek Etika Umum	51
b. Nilai, Norma Sebagai Objek Etika.....	54
B. Teori Etika.	59
1. Teori Idealisme-Etis	59
2. Teori Dentologi Etis	64
3. Teori Teologisme Etis.	67
Bab Dua;	69
Mengenal Tokoh Etika Profesi	69
A. Tokoh Etika Dalam Alam Pemikiran Yunani Kuno.	69
1. Menapak Tilas Sejarah Perkembangan Pemikiran Yunani Kuno: Dari Mitos ke Logos.	69
2. Jaman Patristik dan Skolastik: Filsafat Dalam dan Untuk Agama.	72
3. Memahami Ajaran Etika Socrates.	74
a. Sejarah Kelahiran Socrates.	74
b. Memahami Ajaran Etika Socrates.	76
c. Intisari Pemikiran Etika Socrates	79
4. Pelajaran Etika Menurut Plato.....	81
a. Menapak Tilas Kelahiran Plato.	81
b. Epistemologi Dasar Pemikiran Filsuf Plato.	85
c. Negara Ideal Menurut Plato.	89

d. Ajaran (Ilmu) Etika Menurut Plato. -----	97
5. Aristoteles. -----	99
a. Sejarah Kelahiran Filsuf Aristoteles. -----	99
b. Pemikiran Etika Aristoteles. -----	101
c. Kebahagiaan sebagai tujuan. -----	102
d. Kebahagiaan menurut isinya. -----	103
e. Ajaran tentang keutamaan. -----	104
B. Tokoh Etika Barat. -----	107
1. Thomas Aquinas. -----	107
2. Immanuel Kant. -----	110
C. Konsep Etika Menurut Para Filosof Muslim. -----	114
1. Antara Etika dengan Etika Islam. -----	114
2. Al-Kindi. -----	115
3. Al-Razi. -----	116
4. Al-Farabi. -----	118
4. Ikhwan al-Safa. -----	118
5. Ibnu Maskawaih. -----	119
6. Al-Ghozali. -----	122
7. Ibnu Bajjah. -----	123
8. Ibnu Thufail. -----	124
9. Ibnu Rusyd. -----	125
10. Nashiruddin At-Thusi. -----	125
11. Mulla Shadra. -----	127
12. Iqbal. -----	28
Bab Tiga; -----	130
Melintasi Etika Profesi Kehidupan	
Dengan Pisau Analitis Etika Keilmuan -----	130
A. Prospek Etika Keilmuan Untuk Etika Profesi. -----	130
1. Berkenalan Dengan Etika Keilmuan. -----	130
2. Problema Etika Ilmu Pengetahuan. -----	133
3. Pendekatan Ontologis dalam Keilmuan. -----	135
4. Pendekatan Epistemologi dalam Keilmuan. -----	136
5. Pendekatan Aksiologi dalam Keilmuan. -----	137
6. Sikap Ilmiah yang harus Dimiliki Ilmuwan. -----	138

B. Etika Profesi Kehidupan Manusia. -----	142
1. Antara Manusia Dan Kebutuhannya. -----	142
2. Istilah-Istilah Dasar Profesi. -----	144
a. Pekerjaan, Profesi Dan Profesional. -----	144
b. Istilah Profesi dan Profesional. -----	146
c. Hubungan antara profesi pada umumnya dan profesi luhur. -----	151
3. Syarat Sebuah Profesi Kehidupan. -----	154
4. Prinsip Dasar Etika Profesi. -----	156
5. Manfaat Mempelajari Etika Profesi. -----	157
6. Organisasi Penindakan dan Pengawasan Etika Profesi. -----	160
7. Bentuk Organisasi Etika Profesi. -----	166
C. Berbagai Macam Profesi Yang Terpenting. -----	171
1. Etika Hukum Profesi Kedokteran. -----	171
a. Menyoal Etika Profesi Kedokteran. -----	171
b. Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien. -----	173
c. Hubungan Hukum Kontraktual. -----	177
d. <i>Informed Consent</i> . -----	180
e. Etika (Tanggung Jawab) Hukum Dokter Terhadap Pasien	184
2. Kode Etik Profesi Bidan. -----	186
a. Siapakah Bidan itu? -----	186
b. Pelayanan Kebidanan. -----	187
c. Penerapan Etika Kebidanan. -----	187
d. Penerapan Etika & Moral Dalam Pelayanan Kebidanan. -----	190
3. Kode Etika Profesi Pendidik. -----	195
4. Profesi Hukum. -----	199
D. Menyoal Objektivitas Etika Birokrat. -----	207
1. Antara Politisasi Birokrasi dan Pola Hubungan Politik dalam Birokrasi di Indonesia. -----	207
2. Konsep Politik dan Birokrasi. -----	211
3. Tipe Ideal Birokrasi -----	212
4. Pejabat Politik dan Pejabat Birokrasi -----	214
5. Konteks Historis Politik-Birokrasi di Indonesia. -----	215
a. Periode Prakolonial (Kerajaan). -----	215
b. Periode Kolonial. -----	218
c. Periode Pascakolonial (Penjajahan) -----	221
1.1 Era Orde Lama. -----	221
1.2 Era Orde Baru. -----	224
6. Politisasi Birokrasi: Sebuah Fenomena Mutakhir -----	227
a. Era Transisi, Gusdur dan Megawati -----	227

b. Politisasi pada Pemerintahan SBY-JK-----	229
1.1 Analisis Komposisi dan Koalisi di Parlemen serta Isu-isu Kontemporer.-----	230
1.2 Analisis Komposisi Kabinet Indonesia Bersatu.-----	233
1.3 Analisis Hubungan Golkar, Jusuf Kalla dan Pemerintah.-----	239
E. Etika Pelayanan Kesehatan.-----	241
1. Mengetahui Sistem Pelayanan Kesehatan.-----	241
2. Etika Pelayanan Kesehatan di Indonesia.-----	242
3. Etika Hukum Kesehatan.-----	243
F. Fenomena Etika Pejabat Publik: Sebuah Sorotan -----	246
1. Ada Apa dengan Aceng HM Fikri.-----	246
2. Mempertanyakan Etika PNS (Pegawai Negeri Sipil).-----	248
Bab empat; -----	261
Merancang Model Pelayanan Publik Untuk Pemerintahan Daerah: Pisau Analisis Etika Administrasi Negara -----	261
A. Eksistensi Desentralisasi di Indonesia.-----	261
1. Dari Desentralisasi Menuai Pelayanan Publik.-----	261
2. Mereformasi Pemerintahan Daerah.-----	264
3. <i>Reinventing Government Management: Konsep Pelayanan Publik di era Moderen.</i> -----	266
4. Rekonstruksi Paradigma Pelayanan Publik.-----	269
B. Mengungkap Lemahnya Etika Pelayanan Publik.-----	271
Bab Lima -----	280
Catatan Penutup; Menuju Etika Hukum dengan Penegakkan Hukum Berkarakter Good Governance -----	280
A. Wacana Penegakan Hukum.-----	280
1. Substansi Hukum (<i>legal substance</i>).-----	286
2. Struktur Hukum (<i>legal structure</i>)-----	288
3. Budaya Hukum. (<i>legal culture</i>)-----	291
B. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.-----	295
C. Pengaruh Penegakkan Hukum terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i> .-----	298

Daftar Pustaka -----	303
Riwayat Hidup Penulis -----	314

Bab Satu

Mempelajari Etika Sebagai Sebuah Ilmu Terapan

C. Pengertian dan Istilah Etika.

7. Etika, Etiket, moral dan Moralitas.

Istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa *etika adalah semacam penelaahan*, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri. Pendapat lain menyebutkan bahwa *etika adalah kajian moralitas*. Sedangkan moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penalaran yang baik, dan dengan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan tentang moral yang benar dan salah, dan moral yang baik dan jahat.

Etika dari segi etimologi (ilmu asal usul kata), berasal dari bahasa Yunani, *ethos (ta etha)*¹ arti utamanya adalah kebiasaan, yang berarti juga watak kesusilaan atau adat (*custom*).² Turunan dari kata *ethos*, Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*ethikos*” yang berarti “*timbul dari kebiasaan*” adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana

¹ Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Pengertian ini penulis kutip dari **K. Bertens**, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994, hlm: 4-6. Sementara itu dalam bahasa Inggris etika adalah berasal dari kata *Ethics*, yang artinya sistem prinsip moral bagi perilaku manusia. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa etika merupakan ilmu atau konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar dan buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari kontrol diri karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

² Dalam hal ini, yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang tentunya melekat pada kodrat manusia, seperti kebiasaan berbuat dan berkata jujur, menghormati orang tua, menghargai hidup dan kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain.

yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya etika membahas tentang tingkah laku manusia. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “*Mores*”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Maka secara etimologis, apa yang dinamakan dengan etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup baik dan hidup yang buruk.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. **St. John of Damascus** (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (*practical philosophy*). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang

tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Pengertian harfiah dari etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah di institusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai.

Penulis berpendapat bahwa etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai;

1. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia;
2. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima;

Etika sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional,

1. Mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret terutama yang dihadapi seseorang, atau etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan karena itu dikutuk atau justru sebaliknya
2. Apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakatku ataukah justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu.

Etika sebagai Ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Dengan menggunakan bahasa **Nietzsche**, etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba Dalam bahasa **Kant**, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat di pertanggungjawabkan.

Hal itulah yang mendasari tumbuh kembang nya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika

atau lazim juga disebut etik yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

1. **O.P. Simorangkir;** Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. **Sidi Gajalba;** Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal;
3. **Burhanudin Salam;** Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang *praxis* (tindakan) manusia.³ Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su); Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

³ Berbicara tentang etika sebagai cabang filsafat ilmu pengetahuan, maka etika dapat disebut sebagai "*Philosophical study of morality*", dari pernyataan tersebut maka yang dapat melakukan etika adalah manusia, bukan makhluk ciptaan Tuhan selain manusia, hanya manusia sajalan yang melakukan dan dapat beretika, sehingga tidaklah salah apabila etika ditempatkan sebagai sub cabang dari filsafat manusia (antropologi). Lihat dalam: **Shidarta**, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm: 18-19. Penulis berpendapat bahwa Etika termasuk ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang salah satunya berarti juga sebagai *ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk*, di mana mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Dari segala ini diselidiki oleh Etika, suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk.

Terkait dengan istilah etika, sebagian dari pengguna istilah sering menggunakan juga istilah *etiket*.⁴ Misalnya, jika seorang mahasiswa menghadap dosennya dengan mengenakan sandal jepit, mungkin akan muncul sebuah komentar “*bahwa mahasiswa tersebut tidak beretika*”, hal ini sudah menjadi hal yang umum, namun salah dalam penerapannya, sebenarnya mahasiswa tersebut tidak beretiket.⁵ Pengertian etiket menunjukkan cara suatu perbuatan dilakukan yang diharapkan atau ditentukan dalam suatu kalangan masyarakat, sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket berlaku apabila ada saksi mata atau orang lain yang hadir, sedangkan etika selalu berlaku entah ada orang lain maupun tidak ada. Etiket bersifat relatif, yang dianggap sopan dalam satu kebudayaan bisa dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan lain, sedangkan etika lebih absolut, etika tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, perbuatannya bisa saja baik, tapi ternyata adalah seorang penipu, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam, orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh baik.

Antara etika dengan etiket sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif. Yakni, memberikan norma kepada tingkah laku manusia sehingga dapat menentukan mana yang baik dengan mana yang tidak baik (buruk), apa yang harus dilakukan dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian perbedaan mendasarnya adalah terletak pada cara melakukan suatu perbuatan, tetapi juga memberi

⁴ Etiket merupakan padanan dari kata “*etiquette*” yang artinya aturan-aturan kesopanan atau tata krama bagi perilaku manusia dalam pergaulan bermasyarakat atau diantara anggota-anggota suatu profesi. Etiket berkenaan dengan cara bersopan santun dalam pergaulan. Lihat dalam: **A. S. Horby**, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University: London, 1995, hlm: 393.

⁵ Pengertian etiket dalam hal ini merupakan sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Tentunya apa yang dinamakan dengan sopan dalam situasi atau oleh suatu budaya, akan berbeda menurut situasi atau budaya yang lain. Selanjutnya dapat diperiksa dalam: **Shidarta**, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm: 16-17. Menanggapi hal ini, penulis berpendapat bahwa: Etiket adalah perilaku kita sehari - hari yang kita lakukan dan memandang orang yang ada di sekeliling kita apakah tersinggung atau tidaknya orang dengan perbuatan kita, dan orang yang ber etiket mungkin saja dia bisa membohongi dirinya sendiri karena perbuatannya itu hanya untuk menghargai orang yang ada di sekelilingnya saja tidak murni keluar dari hati nuraninya yang secara tidak langsung dilakukan untuk mendapatkan pujian dari sekelilingnya.

norma tentang perbuatan tersebut, berikut adalah penjelasan tentang perbedaan antara etika dengan etiket:⁶

“Dalam mempelajari etika, tentunya akan terkait dengan persoalan-persoalan masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sehingga etika selalu berlaku di mana dan kapanm saja, entah ada atau tidak ada orang lain sebagai saksi mata. Maka dalam hal ini, prinsip etika adalah suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara itu etiket, menyangkut tentang cara bagaimana suatu perbuatan. Pada umumnya cara tersebut merupakan cara yang tepat dan diharapkan, serta ditunjuk bagi suatu kalangan tertentu”.

Persamaan antara etika dan etiket adalah pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah-istilah ini hanya dipakai mengenai manusia. Hewan tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.⁷

Perbedaan sangat penting antara etika dan etiket menurut Bertens⁸ ada empat macam, yaitu :

1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Diantara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket, bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Tetapi etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan; etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan ya atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak pernah diperbolehkan. ‘Jangan mencuri’ merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri disini sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak terbatas pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket, bila kita makan sambil berbunyi atau

⁶ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Storia Grafika: Jakarta, 2001, hlm: 3-5.

⁷ K Bertens, *Etika*, PT Gramedia: Jakarta, 1993, hlm: 9-13.

⁸ K Bertens, *Etika*, Ibid: 9.

dengan meletakkan kaki di atas meja, dan sebagainya. Sebaliknya, etika selalu berlaku, juga kalau tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak.

3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh yang jelas adalah makan dengan tangan, di suatu daerah tertentu mungkin masih dianggap sopan, namun di Jawa makan yang sopan harus pakai sendok. Lain halnya etika, etika jauh lebih absolut. 'Jangan mencuri', 'jangan bohong', 'jangan membunuh' merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi 'dispensasi'.
4. Jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja, sedang etika menyangkut manusia dari segi dalam.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat empat perbedaan antara etika dan etiket, secara umum sebagai berikut:

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara, untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan;
2. Etika adalah nurani (bathiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas (lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan;
3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya;
4. Etika berlakunya, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku, jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku.

Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan. Secara metodologi, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis,

dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu melihat perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk.

Etika dapat dibagi menjadi *etika deskriptif* dan *etika normatif*. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya sejarah etika. Sedangkan etika normatif sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati dan sebagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan dari pada prinsip-prinsip umum, seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan dan sebagainya.

Pembagian etika yang lain adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu. Misalnya tujuan hidup manusia. Etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya; baik/buruk dalam keluarga, masyarakat, negara.⁹

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama yakni: *meta-etika* (studi konsep etika), *etika normatif* (studi penentuan nilai etika), dan *etika terapan* (studi penggunaan nilai-nilai etika) atau ada juga yang menyebut dengan etika deskriptif.¹⁰ Berikut akan penulis jelaskan perbedaan macam dari etika tersebut

1. **Etika Deskriptif:** *Etika ini melukiskan adat istiadat, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, moralitas dalam arti luas, pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur tertentu, dalam suatu priode sejarah, dan sebagainya. Pendekatan ini bersifat netral, tidak mengemukakan penilaian moral.* Sekarang ini etika deskriptif dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial: antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah. Studi

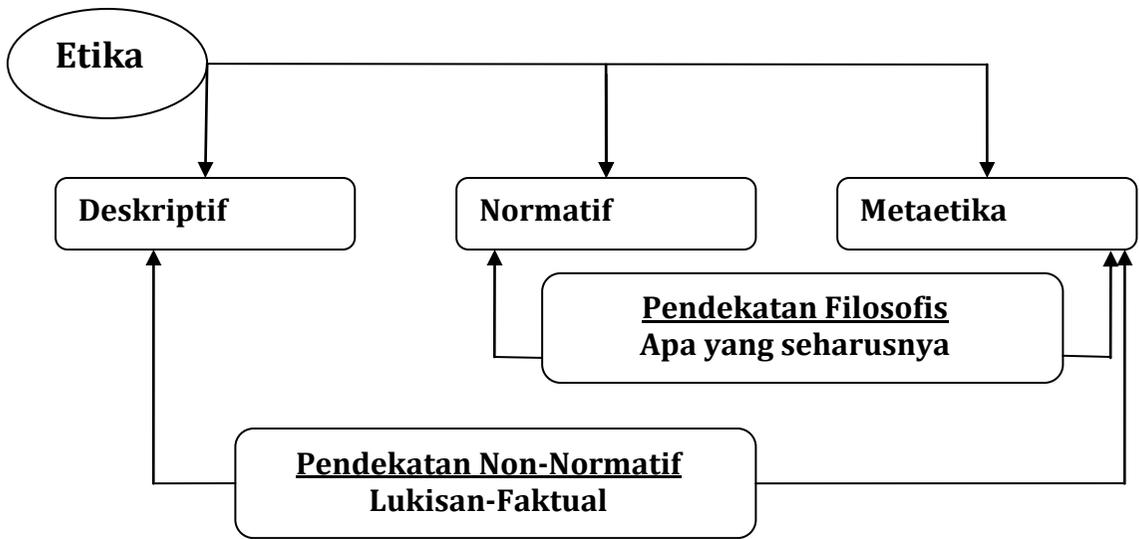
⁹ Sunoto, *Bunga Rampai Filsafat*, Yayasan Pembinaan Fak. Filsafat UGM: Yogyakarta, 1982, hlm: 1-5.

¹⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Ibid: 8-9.

- tentang perkembangan kesadaran moral yang dilakukan oleh **Jean Piaget** (1896-1980) dan **Lawrence Kohlberg** (1927-1988);
2. **Etika Normatif:** *Etika ini bersifat preskriptif (memerintah), tidak melukiskan secara netral, melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Lewat argumentasi-argumentasi, berdasar alasan-alasan yang kuat, prinsip-prinsip etis dirumuskan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Etika normatif dapat dibedakan dalam etika umum dan etika khusus yang juga dinamakan etika terapan;*
 3. **Metaetika:** Awalan meta-(Yun) mempunyai arti “melebihi”. *Istilah ini menunjukkan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, melainkan bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan atau pertanyaan etis. Disini, seperti pada etika deskriptif, peneliti bersikap netral terhadap setiap posisi moral. Keterkaitan dengan filsafat analitis, salah satu pelopornya **George Moore** (1873-1958), yang menganggap analisis bahasa merupakan tugas terpenting bagi filsafat, membuat metaetika disebut juga etika analitis. Jika kita berbicara tentang bahasa moral, dengan mudah sekali pembicaraan kita beralih ke apa yang ditunjukkan oleh bahasa itu, yaitu perilaku moral itu sendiri. Karena itu sulit ditarik garis batas yang tajam antara etika normatif dan metaetika.*
 4. Metaetika dan etika deskriptif merupakan pendekatan non-normatif. Etika deskriptif sendiri merupakan pendekatan non-filosofis. Sedangkan pendekatan filosofis terdiri dari etika normatif dan metaetika.

Franz Magnis Suseno¹¹ Menggambarkan tiga pendekatan etika tersebut dalam sebuah ragaan sebagai berikut:

¹¹ **Franz Magnis Suseno**, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK GRamedia: Jakarta, 1991, hlm: 75; Lihat pula dalam: **Shidarta**, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Ibid: 8.



Gambar 1.1
Model Pendekatan etika Frans Magnis Suseno & K Bertens

Meta-etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Sebagai contoh, "Seorang anak menendang bola hingga kaca jendela pecah." Secara meta-etis, baik-buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah suatu kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain, karena memang dunianya (dunia anak-anak) salah satunya adalah bermain, apalagi ia tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi kalau dilihat dari pihak pemilik jendela, tentu ia akan mendefinisikan hal ini sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan. Bagaimanapun juga hal-hal seperti ini tidak akan pernah menemui kejelasannya hingga salah satu pihak terpaksa kalah atau mungkin masalah menjadi berlarut-larut. Mungkin juga kedua pihak dapat saling memberi maklum. Menyikapi persoalan-persoalan yang semacam inilah, maka meta-etika dijadikan bekal awal dalam mempertimbangkan suatu masalah, sebelum penetapan hasil pertimbangan dibuat.

Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Dalam perbincangan dan diskusi–diskusi yang acapkali ditampilkan dan diungkapkan di media masa baik cetak , elektronik maupun virtual, kajian etika normatif yang berkaitan dengan masalah moral maerupakan topik bahasan yang paling menarik.

Etika terapan merupakan kepedulian terhadap etika yang lebih mendalam dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik. Etika terapan (*applied ethics*) sama sekali bukan hal yang baru dalam sejarah filsafat moral. Sejak **Plato** dan **Aristoteles**, etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperlihatkan apa yang harus dilakukan. Sifat praktis ini bertahan selama seluruh sejarah filsafat. Dalam abad pertengahan, **Thomas Aquinas** melanjutkan tradisi filsafat praktis ini dan menerapkannya di bidang teologi moral. Pada awal zaman modern muncul etika khusus (*ethica specialis*) yang membahas masalah etis suatu bidang tertentu seperti keluarga dan negara. Namun pada dasarnya etika khusus dalam arti sebenarnya sama dengan etika terapan.

Adapun Jenis-jenis Etika adalah sebagai berikut:

1. **Etika Filosofis:** Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat. Ada dua sifat etika, yaitu:
 - a. Non-empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
 - b. Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena

langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif, dimana etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dsb, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya.

2. **Etika Teologis:** Terdapat dua hal-hal yang berkaitan dengan etika teologis. Pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena itu banyak unsur-unsur di dalamnya yang terdapat dalam etika secara umum, dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum. Secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi-presuposisi teologis. Definisi tersebut menjadi kriteria pembeda antara etika filosofis dan etika teologis. Setiap agama dapat memiliki etika teologisnya yang unik berdasarkan apa yang diyakini dan menjadi sistem nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, antara agama yang satu dengan yang lain dapat memiliki perbedaan di dalam merumuskan etika teologisnya.

Etika dalam perkembangannya dapat juga disebut sebagai moral, istilah moral dalam hal ini berasal dari bahasa latin yakni *mores* kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Moral (Bahasa Latin *Moralitas*) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif.

Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, peraturan-peraturan apakah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak seperti kitab Wulangreh karangan **Sri Sunan Pakubuwono IV**.

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada ditingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran

moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang karena etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu.¹²

Etika pada hakekatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkatkan kerancuan (kekacauan). Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawaban.

Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral. Sedangkan kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.¹³

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama.

Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Kanisius: Yogyakarta, 1987, hlm: 14-17.

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Ibid: 18-23.

fungsi kontrol untuk menyeimbangkan bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Moral sebenarnya tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya, setempat yang diyakini kebenarannya. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Hal tersebut akan lebih mudah kita pahami manakala mendengar orang mengatakan perbuatannya tidak bermoral. Perkataan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Franz Magnis Suseno¹⁴ membahas, ajaran tentang moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Ajaran moral bersumberkan kepada berbagai manusia dalam kedudukan yang berwenang, seperti para bijak, antara lain para pemuka agama dan masyarakat, tulisan-tulisan para bijak.

E. Sumaryono¹⁵ mengklasifikasikan moralitas atas:

1. **Moralitas objektif:** *Moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya. Jadi perbuatan itu mungkin baik atau buruk, mungkin benar atau salah terlepas dari berbagai modifikasi kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap pelakunya. Contoh: membunuh merupakan perbuatan tidak baik;*
2. **Moralitas subjektif:** *Moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor pelakunya, seperti emosional, latar belakang, pengetahuan, dsbnya.*
3. **Moralitas intrinsik:** *Moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya terlepas tidak bergantung dari pengaruh hukum positif, contohnya berilah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal tersebut pada dasarnya sudah merupakan kewajiban. Meskipun kemudian diatur dalam hukum positif, tidaklah memberikan akibat yang signifikan;*
4. **Moralitas ekstrinsik:** *Moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya bergantung dari pengaruh hukum positif. Hukum positif dijadikan patokan dalam menentukan kebolehan dan larangan atas suatu perbuatan.*

¹⁴ **Franz Magnis Suseno**, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Ibid: 90-96.

¹⁵ **E.Sumaryono**, *Etika Hukum*, Kanisius: Jakarta, 2002.

EY. Kanter¹⁶ tidak hanya membahas etika pada wilayah individu akan tetapi terdapat pendapatnya, bahwa moralitas individu mendapat ruang gerak dalam wilayah moralitas masyarakat (publik). Moralitas publik adalah moralitas yang terwujud dan didukung oleh wilayah publik, artinya didukung oleh struktur kekuasaan politik, ekonomi dan ideologi. Mutu moralitas publik banyak ditentukan oleh pelaksanaan kepemimpinan dalam suatu negara, misalkan cara pengambilan keputusan dibuat dengan etis atautkah tidak. Etika merefleksikan mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai moralitas.

Sementara itu, **Liliana Tedjosaputro**¹⁷ membagi moralitas kedalam dua bagian yakni:

1. **Moralitas dapat bersifat intrinsik**, *berasal dari diri manusia itu sendiri sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada;*
2. **Moralitas yang bersifat ekstrinsik**, *penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan.*

Pelaksanaan peraturan hukum membutuhkan moral dari pelaku. Hukum meskipun harus mengacu pada kepentingan sosial kemasyarakatan agar tercapai suatu kepastian dan keadilan hukum, namun produk hukum itu sendiri tidak dapat lepas dari produk politik yang tidak dapat mengcover seluruh kehendak masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dengan baik dan ikhlas sesungguhnya bergantung pada moral setiap individu, bukan bergantung pada sifat memaksa dari

¹⁶ **E. Y. Kanter**, *Etika Profesi Hukum*, Op cit.

¹⁷ **Liliana Tedjosaputro**, *Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum*, Aneka ilmu: Semarang, 2003, hlm: 56. Bandingkan dengan pendapatnya dari **Immanuel Kant**, yang membedakan moralitas dalam dua tingkatan: *pertama*; Moralitas hetronom, sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak sipelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu; *Kedua*; Moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Didalam moralitas otonom orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya taupun lantaran takut pada penguasa, melainkan itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan mahluk rasional atau manusia.

hukum. Guna memudahkan pengertian tersebut maka dapat diberikan suatu gambaran manakala seseorang tidak melaksanakan suatu peraturan ataupun etika maka orang tersebut merasa sebagai beban moral.

Shidharta¹⁸ mengemukakan, setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral dalam menghadapi keadaan-keadaan yang menyertai perjalanan hidupnya. Sikap moral ini ada yang hadir begitu saja tanpa harus disertai pergulatan atas pilihan-pilihan dilematis, namun ada pula sikap moral yang perlu direnungkan secara mendalam sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan. Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu tindakan. Renungan terhadap moralitas tersebut merupakan pekerjaan etika. Dengan demikian, setiap manusia siapapun dan apapun profesinya membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya. Dalam konteks inilah lalu timbul suatu cabang etika yang disebut etika profesi.

Etika merupakan hasil perenungan dari moralitas yang dirasakan perlu adanya etika dalam kehidupan, karena merupakan kewajiban moral untuk mewujudkan sesuatu yang baik baik bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pendapat lain menyatakan moral berasal dari dalam relung hati yang terdalam sehingga perbuatan baik ataupun buruk sebenarnya dirinya sendiri sebagai penilai utama, sedangkan etika merupakan manifestasi dari moral yang berasal dari adat kebiasaan dan sosial kemasyarakatan yang telah berproses menjadi suatu bentuk etika sebagai pedoman bertindak baik ranah formal maupun non formal sehingga sering dikatakan suatu perbuatan baik bila dilaksanakan maka telah beretika serta sebaliknya dikatakan tidak beretika.

Nilai-nilai etika dan moral harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan di bidang keilmuan. Tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar **Charles darwin**, adalah ketika menyadari bahwa kita seyogyanya mengontrol pikiran kita. Pikiran merupakan faktor penentu dan pemutus suatu tindakan yang akan kita lakukan, pikiran yang baik dapat menghasilkan moral atau etika yang baik sedangkan pikiran yang buruk akan menghasilkan tindakan yang buruk, yang perlu dipahami bahwa segala gerakan organ tubuh merupakan pikiran sebagai pemimpin. Pada

¹⁸ **Shidarta**, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Ibid: 69-dst.

kondisi manusia yang telah mampu mempergunakan pikiran sebagai *filter* atau alat kontrol bagi perbuatannya maka hal yang buruk dapat ditiadakan minimal dapat ditekan.

Dalam lingkup global seperti yang kita rasakan saat ini, **Alvin Tofler**¹⁹ memberi gambaran betapa manusia dewasa ini dan dimasa-masa mendatang akan mengalami *indeks kesementaraan*, yang mengakibatkan manusia terjebak dalam keanekaragaman gaya hidup dan banyak kepribadian. Menurutnya,

"Apabila keanekaragaman bertemu dan berpadu dengan kesementaraan dan kebaruan, masyarakat akan meroket kesuatu krisis adaptasi yang historis. Kita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementara asingnya dan kompleksnya sehingga mengancam jutaan orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejutan masa depan".

Ajaran-ajaran moral guna meningkatkan moralitas agar manusia menjadi baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi rasional dan kritis guna mendukung ajaran moral. Dalam perkembangan jaman yang makin kompleks timbullah tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. Padahal apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Etika yang telah disepakati oleh setiap kelompok akan menepis kehilangan orientasi sehingga kebenaran sebenarnya bersifat relatif karena kebenaran merupakan produk pikiran masing-masing sehingga perlu adanya kesepakatan yang tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kebenaran universal.

Liliana Tedjosaputro²⁰ memaparkan bahwa, dalam perkembangannya kajian etika, terdapat banyak aliran-aliran di dalamnya. Beberapa aliran penting dalam etika adalah sebagai berikut:

1. **Etika naturalisme;** ialah aliran yang beranggapan bahwa kebahagiaan manusia itu didapatkan dengan menurutkan panggilan *natura (fitrah)* kejadian manusia sendiri;

¹⁹ **Alvin Toffler**, *Future Shock: Kejutana Masa Depan*, PT. Panjja Simpati: Jakarta, 1990.

²⁰ **Liliana Tedjosaputro**, *Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum*, Op cit: 106.

2. **Etika hedonisme;** ialah aliran yang berpendapat bahwa perbuatan susila itu adalah perbuatan yang menimbulkan hedone (kenikmatan dan kelezatan);
3. *Etika utilitarianisme* ialah aliran yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia itu ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia (*utility=manfaat*);
4. **Etika idealisme;** ialah aliran yang berpendirian bahwa perbuatan manusia janganlah terikat pada sebab musabab lahir, tetapi haruslah berdasarkan pada prinsip kerohanian (*idea*) yang lebih tinggi;
5. **Etika vitalisme;** ialah aliran yang menilaibaik buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada tidak adanya daya hidup (*vital*) yang maksimum mengendalikan perbuatan itu;
6. **Etika theologis;** ialah aliran yang berkeyakinan bahwa ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia itu dinilai dengan sesuai dan tidak sesuainya perbuatan itu dengan perintah Tuhan (*Theos=Tuhan*).

Franz Magnis Suseno²¹ mengemukakan pendapat tentang etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini perlu dicari dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral. Dalam keseharian kita banyak bertemu dan bergaul dengan berbagai orang dan karakter yang serba berbeda dari suku yang beragam, daerah asal yang bervariasi, agama berbeda, dan sebagainya. Kita ada ditengah-tengah pandangan mengenai etika dan moral yang beraneka ragam bahkan tidak jarang saling bertentangan sehingga kita bingung mengikuti moralitas yang mana. Untuk menentukan pilihan itulah perlu refleksi kritis etika.
2. Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang kian lama menuju modernisasi. Meski masih belum dijumpai batasan baku tentang makna modernisasi, konsep ini membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menentang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Proses perubahan sosial budaya dan moral ternyata tidak jarang digunakan berbagai pihak untuk memancing di air keruh. Adanya pelbagai ideologi yang ditawarkan sebagai penuntun hidup, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus

²¹ **Franz Magnis Suseno**, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Op cit : 90-96.

hidup. Etika dapat dijadikan tatanan untuk mengkritisi secara objektif dan memberi penilaian agar tidak mudah terpancing, tidak naif, atau ekstrem untuk cepat-cepat menolak hanya karena masih relatif baru dan belum biasa.

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu
5. Refleksi kritis etika tidak hanya untuk menentukan moralitas mana yang dipakai karena terdapat norma yang bertentangan. Refleksi kritis etika merupakan alat untuk memecahkan permasalahan moral, seperti perubahan moral yang diakibatkan oleh proses transformasi menuju modernisasi yang menentang keberadaan pandangan moral tradisional.

Etika yang berkaitan dengan etika profesi merupakan etika yang senantiasa mengikuti perkembangan modernisasi yang tak dapat dibendung, sehingga perlunya etika yang kritis untuk mengatasi kendala yang ada. Tidak dapat dipungkiri penyandang profesi, pemuka masyarakat/adat, filosof, hukum yang berfungsi sebagai salah satu faktor penentu etika yang kritis. Keadilan, kepastian hukum, equality before the law merupakan harapan moral masyarakat yang masih terus diperjuangkan.

Berdasarkan hasil dari perenungan penulis, etika dapat juga disebut sebagai akhlak, Secara linguistik atau bahasa, akhlak berasal dari bahasa arab yakni *khuluqun* yang menurut loghat diartikan: *budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat*. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalakun* yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan *khaliq* yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Menurut **Al Ghazali** akhlak adalah *sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi*. Sedangkan sebageian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu:

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila.
3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk.
4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara
5. Sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.

Secara garis besar, akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak baik (*akhlak al-karimah*) dan akhlak yang buruk (*akhlak madzmumah*). Yang termasuk akhlak baik misalnya seperti berbuat adil, jujur, sabar, pemaaf, dermawan, amanah, dan lain sebagainya. Sedangkan, yang termasuk akhlak buruk adalah seperti berbuat dhalim, berdusta, pemaarah, pendendam, kikir, curang, dan lain sebagainya. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan *Khaliq* atau dengan sesama makhluk. **Rasulullah saw** bersabda: "*Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah ialah yang paling baik akhlaknya*".

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk *infinitive*) dari kata *al-akhlaqa*, *yukhliq*, *ikhlaqan*, sesuai timbangan (*wazan*) *tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *at-thobi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-mar'uah* (peradaban yang baik) dan *al-din* (agama). Namun akar kata akhlak dari *akhlaqa* sebagai mana tersebut diatas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata *akhlaqa* bukan akhlak, tetapi *ikhlaq*. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara *linguistic*, akhlak merupakan *isim jamid* atau *isim ghair mustaq*, yaitu isim yang tidak

memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya.

8. Etika Sebagai Cabang Filsafat Ilmu.

Filsafat dapat dimaknai sebagai pandangan hidup, tentunya pandangan hidup yang cinta akan kebijaksanaan, disisi lain filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang selalu mencari hakekat yang terdalam. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk nilai atau sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman perilaku oleh individu, kelompok, masyarakat. Pada prinsipnya cabang filsafat dapat dikelompokkan pada tiga cabang filsafat yaitu: *Ontologi*; *Epistemologi*; serta, *Aksiologi*.

Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. *Epistemologi* adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat susunan, metode, dan validitas pengetahuan. *Aksiologi* merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Pada kelompok aksiologi dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat etika dan estetika. Dapat disimpulkan etika merupakan cabang dari filsafat tentang hakikat nilai atau aksiologi yang merupakan nilai berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia atau kelompok manusia. Etika membahas tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia dan nilai inilah dikenal sebagai moral.

Ontologi²² merupakan salah satu kajian kefilosofan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang terkenal diantaranya **Thales, Plato, dan Aristoteles**. Pada masanya, kebanyakan orang belum mampu membedakan antara *penampakan* dengan *kenyataan*. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* yang berbentuk jasmani / kongkret maupun rohani / abstrak.²³ Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh **Rudolf Goclenius** pada tahun 1636 M untuk menamai teori tentang hakikat

²² Ontologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, artinya *being* atau ada, dan logos = *logic* atau ilmu. Jadi, ontologi bisa diartikan: “*The theory of being qua being*” (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan), atau Ilmu tentang yang ada.

²³ **Amsal Bakhtiar**, *Filsafat Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.

yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangan selanjutnya **Christian Wolf** (1679–1754 M) membagi Metafisika menjadi 2 yaitu:²⁴

1. Metafisika Umum, disebut juga sebagai Ontologi merupakan *Metafisika umum* dimaksudkan sebagai istilah lain dari *ontologi*. Jadi *metafisika umum atau ontologi* adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada;
2. Metafisika Khusus, dapat berupa *Kosmologi, Psikologi, Teologi*.

Dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran antara lain: *Monoisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, dan Agnotisisme*. Aliran dalam mempelajari ontologi tersebut, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:²⁵

1. **Monoisme**: *Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun rohani. Paham ini kemudian terbagi kedalam 2 aliran :*
 - a) **Materialisme**: Aliran materialisme ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Bapak Filsafat yaitu **Thales** (624-546 SM). Dia berpendapat bahwa *sumber asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan*. Aliran ini sering juga disebut *naturalisme*. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi / alam, sedangkan jiwa / ruh tidak berdiri sendiri. Tokoh aliran ini adalah **Anaximander** (585-525 SM). Dia berpendapat bahwa *unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan*. Dari segi dimensinya paham ini sering dikaitkan dengan teori Atomisme. Menurutnya semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap tak dapat dirusakkan. Bagian-bagian yang terkecil dari itulah yang dinamakan atom-atom. Tokoh aliran ini adalah **Demokritos** (460-370 SM). Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat di hitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam.
 - b) **Idealisme**: Idealisme diambil dari kata *idea*, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. *Idelisme* sebagai lawan *materialisme*, dinamakan juga *spiritualisme*. *Idealisme* berarti serbacita, *spiritualisme* berarti serba ruh. Aliran *idealisme* beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua

²⁴ **Anton Bakker**, *Ontologi Metafisika Umum*. Pustaka Kanisius: Yogyakarta, 1992.

²⁵ **Bagus Lorens**. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Tokoh aliran ini diantaranya: **Plato** (428-348 SM) dengan teori ide-nya. Menurutnya, *tiap-tiap yang ada dialam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu*. **Aristoteles** (384-322 SM), memberikan sifat keruhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Pada Filsafat modern padangan ini mula-mula kelihatan pada **George Barkeley** (1685-1753M) yang menyatakan objek-objek fisis adalah ide-ide. Kemudian **Immanuel Kant** (1724-1804 M), **Fichte** (1762-1814 M), **Hegel** (1770-1831 M), dan **Schelling** (1775-1854 M)

2. **Dualisme:** Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Tokoh paham ini adalah **Descartes** (1596-1650 M) yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran (ruhani) dan dunia ruang (kebendaan). Tokoh yang lain: **Benedictus De spinoza** (1632-1677 M), dan **Gitifried Wilhelm Von Leibniz** (1646-1716 M);
3. **Pluralisme:** Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Tokoh aliran ini pada masa Yunani Kuno adalah **Anaxagoras** dan **Empedocles** yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah **William James** (1842-1910 M) yang terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya *The Meaning of Truth*, **James** mengemukakan bahwa *tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Apa yang kita anggap benar sebelumnya dapat dikoreksi/diubah oleh pengalaman berikutnya;*
4. **Nihilisme:** Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti *nothing* atau tidak ada. Doktrin tentang nihilisme sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, tokohnya yaitu **Gorgias** (483-360 SM) yang memberikan 3 proposisi tentang realitas yaitu: *Pertama*, tidak ada sesuatupun yang eksis, *Kedua*, bila sesuatu itu ada ia tidak dapat diketahui, *Ketiga*, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh modern aliran ini diantaranya: **Ivan Turgeniev** (1862 M) dari Rusia dan **Friedrich Nietzsche** (1844-1900 M), ia dilahirkan di Rocken di Prusia dari keluarga pendeta;
5. **Agnosisisme:** Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun ruhani.

Kata *Agnosticisme* berasal dari bahasa Greek yaitu *Agnostos* yang berarti *unknown* A artinya *not* *Gno* artinya *know*. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti: **Soren Kierkegaard** (1813-1855 M), yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat *Eksistensialisme* dan **Martin Heidegger** (1889-1976M) seorang filosof Jerman, serta **Jean Paul Sartre** (1905-1980M), seorang filosof dan sastrawan Prancis yang atheis.

Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat, epistemologi dikenal sebagai sub sistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.

Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti juga lazimnya keterkaitan masing-masing sub sistem dalam suatu sistem--membuktikan betapa sulit untuk menyatakan yang satu lebih penting dari yang lain, sebab ketiga-tiganya memiliki fungsi sendiri-sendiri yang berurutan dalam mekanisme pemikiran. Ketika kita membicarakan epistemologi, berarti kita sedang menekankan bahasan tentang upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Dari sini setidaknya didapatkan perbedaan yang cukup signifikan bahwa aktivitas berpikir dalam lingkup epistemologi adalah aktivitas yang paling mampu mengembangkan kreativitas keilmuan dibanding ontologi dan aksiologi.

Menurut **EY.Kanter**,²⁶ Etika sama artinya dengan filsafat moral atau ilmu tentang moralitas. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan filsafat atau pemikiran rasional-kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Jadi etika bukan sebuah ajaran melainkan sebuah ilmu. Filosof **Plato** mengungkapkan filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang didalamnya mencakup empat persoalan sebagai berikut:

1. Apakah yang dapat kita ketahui ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh metafisika (ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non fisik atau tidak terlihat).
2. Apakah yang boleh kita kerjakan ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh etika.
3. sampai dimanakah pengharapan kita ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh agama.

²⁶ **EY Kanter**, *Etika Profesi Hukum*, Op cit: 8

4. Apakah yang dinamakan manusia? Pertanyaan tersebut dijawab oleh antropologi (ilmu tentang manusia).

Mengamati pemikiran **Plato** maka makin mendukung opini bahwa etika merupakan bagian dari filsafat hal tersebut merupakan jawaban terhadap tujuan utama dari filsafat yang berarti cinta akan kebijaksanaan adalah untuk kebaikan umat manusia yang bijaksana penuh dengan kedamaian. Guna mendukung pendapat **Plato** dapat kita padukan dengan pendapat **Aristoteles** yang dikutip dari **I Gede A.B.Wiranata sebagai**²⁷ berikut:

Pembagian filsafat menurut **Aristoteles**, dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. **Filosofia teoritika/spekulatif**: Filsafat yang bersifat objektif, yang terdiri atas;
 - a) Fisika (mengkaji tentang dunia materiil);
 - b) Matematika (mengkaji tentang barang menurut kuantitasnya);
 - c) Metafisika (mengkaji tentang “ada”).
2. **Filosofia praktika** (Filsafat yang memberi petunjuk dan berbagai pedoman mengenai tingkah laku hidup dan kesusilaan yang seharusnya dilakukan/diperbuat), yang meliputi:
 - a) Etika (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup perseorangan);
 - b) Ekonomia (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup kekeluargaan)
 - c) Politika (mengkaji tentang kesusilaan dalam tantangan hidup kenegaraan).

Filosofia produktiva (pencipta) (filsafat yang mengkaji dan membimbing serta menuntun manusia tentang pengetahuan sehingga menjadikan manusia produktif melalui sebuah ketrampilan yang bersifat khusus). **Aristoteles** merupakan tokoh filsafat yang menempatkan etika sebagai pembahasan utama dalam tulisannya “*Ethika Nichomachea*” dengan pendapatnya, tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh *egoisme* atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan kepada hal-hal yang *altruistik*, yaitu memperhatikan orang lain.

²⁷ **I Gede A.B.Wiranata**, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.

Menurut **Srisumantri**²⁸ filsafat dalam perkembangannya antara lain mencakup:

1. Epistemologi (filsafat pengetahuan);
2. Etika (filsafat moral);
3. Estetika (filsafat seni);
4. Metafisika;
5. Filsafat politik;
6. Filsafat;
7. Filsafat agama;
8. Filsafat pendidikan;
9. Filsafat hukum;
10. Filsafat sejarah;
11. Filsafat matematika.

Sebagai bagian filsafat dan bahkan sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua, maka etika juga dikembangkan sebagai bagian dari kajian ilmu pengetahuan. Filosof **H.De Vos** juga menyatakan etika sebagai bagian dari filsafat. Etika dapat dibedakan menjadi, etika umum dan etika khusus. Etika umum *membahas tentang prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, tanggung jawab, suara hati*. Etika khusus *merupakan etika yang sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, kehidupan pribadi, antar pribadi*.

Penulis mempunyai pandangan bahwa Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Maka dengan demikian, etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sementara itu Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud, bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan

²⁸ **Jujun S Suriasumantri**, *Filsafat Ilmu Sebuah PEngantar Populer*, Sinar Harapan: Jakarta, 2007.

manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanaknya, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya. Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian: Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Serta, Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Etika dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besar terdapat tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika yaitu:

1. **Aspek Normatif:** aspek normatif ialah aspek yang mengacu pada norma-norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur profesional. Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala unsur-unsurnya tetap berpijak pada norma, baik norma-norma kehidupan bersama ataupun norma-norma moral yang diatur dalam standar profesi bagi kaum profesi;
2. **Aspek Konseptual:** diarahkan pada penjernihan konsep-konsep/ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Kajian konseptual ini juga untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri;
3. **Aspek Deskriptif:** kajian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Aspek ini memberikan informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi, sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera direalisasikan.

Etika merupakan cabang filsafat sebagai ilmu yang merupakan *philosophical study of morality*, sehingga subyek yang melakukan etika adalah manusia, dengan demikian etika sebagai filsafat manusia.

9. Pendefinisian Etika Profesi.

Belum ada kata sepakat mengenai pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang bisa dikatakan sebagai profesi. Ada yang mengatakan bahwa profesi adalah “jabatan seseorang walau profesi tersebut tidak bersifat komersial”. Secara tradisional ada 4 profesi yang sudah dikenal yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. Biasanya dipahami sebagai suatu

kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri-ciri profesionalisme:

1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
3. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya
4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Menurut Artikel dalam *International Encyclopedia of education*, ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu:

1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (*Code of conduct*) profesi adalah:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya

2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu
4. Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasinya.

10. Sejarah Etika.

Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. **St. John of Damascus** (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (*practical philosophy*).

Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. **Socrates** (469-399 B.C.) menggunakan pendekatan yang menggalakkan rekan-rekannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesehatan roh. *Idea* utama **Socrates** tentang etika adalah berhubung dengan menyakinkan orang agar berakhlak mulia. **Socrates** mengatakan bahawa kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika akan mengganggu orang lain malah beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. **Plato** (428-348B.C.) mengkaji hubungan etika dan personaliti manusia. Kebaikan moral adalah suatuimbangan dan harmoni di kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. Kebaikan moral sebagai suatu keperluan terhadap kesihatan roh tetapi kebaikan yang sejati adalah sukar dicapai. Mengikut Plato kebaikan moral adalah berada di bahagian dalaman intelektual. **Aristotles** (384-322B.C.) pula, beliau melihat kebaikan moral agak berbeda daripada Plato dan

Socrates di mana beliau menyatakan bahwa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual tetapi lebih kepada sifat (*character*) atau personaliti. Plato dan Socrates pula mengatakan beretika itu mempunyai hubungan yang rapat antara kebaikan moral dan personaliti yang sihat. Bagaimanapun ketiga-tiga ahli falsafah ini berpendapat bahwa kebajikan seseorang itu bergantung sepenuhnya dan berada dalam tangan seseorang itu. Sekiranya etika dahulu menekankan kebaikan moral dan rasionalnya, etika moden banyak menfokuskan kepada menentukan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. Etika moden telah membentuk dua persaingan yaitu :

1. Tindakan yang mempunyai sifat etika dalaman dan memerlukan status moral daripada akibat (*consequences*) yang dibuat tindakan itu sama ada betul atau salah.
2. Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan sekarang dikenali dengan *Deontologikal* yaitu pendekatan kepada etika.

Berbicara tentang Etika tidak luput dari perhatian mengenai perbuatan-perbuatan manusia menuju tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan atau sebaliknya. Perhatian itu terus berkembang sejak zaman lampau hingga sekarang bahkan sejarawan hingga ilmuan sudah mulai tertarik untuk meneliti nya dengan melalui berbagai pendekatan yang tersusun secara sistematis. Perkembangan etika dalam hal ini adalah bagaimana para filosof Yunani memandang hakikat etika serta keutamaanya tentunya dengan kaca mata masing-masing. Filosof Yunani pertama kali yang mengemukakan pemikiran tentang etika adalah **Socrates**, ia dipandang sebagai perintis terciptanya ilmu etika sehingga ia dijuluki bapak pertama etika. Bagi **Socrates** hakikat etika adalah pengetahuan, semua orang berpengetahuan namun tidak semua orang berpendidikan. Orang untuk mencapai pengetahuan haruslah dengan melalui pendidikan. Inilah hal yang ingin disampaikan oleh Sokrates bahwa dengan pendidikan baik orang yang bermoral ataupun tidak akan nampak jelas dalam tindakannya.²⁹

²⁹ Untuk melihat perkembangan sejarah dalam Etika ini, dapat pembaca membaca bukunya **Juhaya S Praja**, dalam bukunya tersebut, beliau membicarakan secara panjang lebar bagaimana sejarah filsafat yunani pra socrates sampai **Socrates**. . Dapat dilihat dalam: **Juhaya S Praja**, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2013, hlm: 71-dst.

Dalam pemikirannya, **Socrates** melahirkan 4 aliran Etika, yaitu:³⁰

1. **Siniks**, dikenal dengan golongan Antitenes. Golongan ini berpendapat bahwa etika dalam prakteknya adalah sikap menahan diri dari nafsu atau membenci kemewahan.
2. **Sirinain**, disebut juga dengan golongan Hedonis. Aliran ini mengutamakan kesenangan dalam hidupnya. Bagi mereka kesenangan adalah jalan hidup. Kemewahan, kemegahan, kekuasaan dll. merupakan perlengkapan wajib dalam kehidupan asalkan tidak menimbulkan unsur mendominasi satu sama lain.
3. **Negarian**, aliran ini mengungkapkan bahwa etika adalah ukuran menuju kebaikan tertinggi. Namun, kebaikan tertinggi tersebut bukan terdapat pada diri kita tetapi di luar diri kita yang mana itu merupakan sebuah rahasia segala jagat raya, kebaikan ini lazim dengan sebutan Tuhan, Rasio, wisdom, dll.
4. **Platonis**, yang nantinya aliran ini ditokohi oleh Plato. Platonis memiliki pandangan yang hampir sama dengan Aristo mengenai Etika, hanya saja yang membedakannya adalah bahwa Etika menurut Aristo bukan hanya sekedar tahu akan tetapi tuga adanya pelaksanaannya.

Kemudian **Nietshe**³¹ mengemukakan pendapatnya bahwa etika adalah jalan menuju tujuan hidup, tujuan dalam hal ini adalah kebaikan. Kebaikan atau baik maksudnya adalah mencapai hidup yang bermutu, bernilai, berkualitas, bermartabat, dll. Kehendak untuk berkuasa merupakan saripati dari seluruh petualangan pemikiran **Nietzsche**. Kehendak berkuasa ini didapat bukan dengan cara mengumpulkan premis-premis silogisme yang selanjutnya ditulis dalam kerangka yang sistematis. Kehendak untuk kuasa adalah hasil dari kontemplasi yang panjang **Nietzsche**. **Nietzsche** mengemukakan bahwa kehendak untuk berkuasa merupakan prinsip dari seluruh kehidupan manusia dan alam. Kehendak dalam kehendak untuk berkuasa ini bisa disebut sebagai

³⁰ **Ethel M Albert**, *Great Tradition in Ethics*, Van Nostrand Reinbold Company: New York-Toronto-London-Melbourn, 1969.

³¹ Untuk mempelajari siapa Nietzsche ini, pembaca diharapkan untuk membaca bukunya: **Peter Levine**, *Nietzsche: Potret Besar Sang Filsuf*, IRCiSOD: Yogyakarta, 2012. Nietzsche yang bernama lengkap Friedrich Willem Nietzsche lahir di Röcken, 15 Oktober 1844, adalah seorang filsuf yang terkenal dengan kata "God Is Dead". Tulisannya berbentuk aforisme yang menandakan bahwa dia tidak ingin mengikuti sistem pada zamannya. Nietzsche juga dikenal sebagai seorang filsuf yang mengacak-acak moralitas, terutama moralitas Kristen di Eropa pada saat itu. Konsepnya mengenai *Übermensch* juga menjadi inti pemikiran dari Nietzsche. Kali ini saya akan membahas etika menurut **Nietzsche**.

kekuatan yang memerintahkan dirinya sendiri, bersifat memerintah dan menaati tanpa mengandaikan pasivitas apapun. Dalam kehendak untuk berkuasa, tidak ada pihak yang bersifat pasif. Hal ini menurut Nietzsche karena untuk menaati perintah kehendak untuk berkuasa tersebut dibutuhkan kekuatan untuk memerintah diri sendiri.³²

Menurut **Nietzsche**, moralitas setiap orang yang lemah maupun kuat merupakan ungkapan kehendak untuk mengatasi diri atau kehendak untuk berkuasa. Kehendak untuk berkuasa sebagai prinsip moralitas terlihat dari perbedaan macam-macam moral berdasarkan tujuan dari moral tersebut. Lebih jelasnya lagi, **Nietzsche** menyatakan untuk memahami moralitas, kita harus menghubungkannya dengan hidup yang tidak lain adalah kehendak untuk berkuasa. **Nietzsche** menolak adanya fakta moral. Menurutnya, *fakta moral itu tidak ada yang ada hanya interpretasi moral*.³³

Kehendak untuk berkuasa selain sebagai prinsip moralitas juga sebagai nilai tertinggi yang menurut Nietzsche harus dicapai manusia untuk menghadapi tekanan-tekanan kekuatan atau kehidupan. Ketika manusia sudah mencapai nilai ini dengan mewujudkan kehendak berkuasa, berpotensi untuk menjadi manusia super atau lebih terkenal dengan istilah *Übermensch*. *Übermensch* adalah manusia baru yang kembali ke semangat kekuasaan, yang telah terbebas dari belenggu sistem nilai dan moralitas lama dan mewujudkan kehendak untuk berkuasa. *Übermensch* adalah manusia yang berani untuk berkata “*TYA*” pada hidup yang penuh dengan *chaos* ini.

Nietzsche membagi moralitas menjadi dua, moralitas budak dan moralitas tuan. Moralitas budak adalah moralitas orang kecil, masal, lemah, moralitas yang tidak mampu untuk bangkit dan menentukan hidupnya sendiri dan selalu iri terhadap mereka yang kuat. Moralitas ini juga disebut dengan moralitas kawanan. Moralitas ini, menurut **Nietzsche**, cocok bagi mereka yang tidak punya semangat dan ambisi

³² Bandingkan dengan pendapatnya **Franz Magnis Suseno**, *13 Tokoh Etika*, Kanisius: Yogyakarta, 1997.

³³ Pengertian tentang moralitas, menurut **Nietzsche**, adalah penafsiran untuk suatu penilaian. Pemikiran ini tidak terlepas dari kritiknya terhadap **David Hume** tentang adanya pengakuan fakta moral. Interpretasi dan penafsiran suatu penilaian dilakukan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Hidup adalah satuan kekuatan-kekuatan yang berada di bawah satu penguasaan dan moralitas ada untuk mengatasi kekuatan itu. Oleh karena itu, **Nietzsche** mengembalikan keutamaan moral manusia selama ini kepada fungsi organik dan biologis yang memang manusia butuhkan untuk mempertahankan hidup. Lihat dalam: **St. Sunardi**, *Nietzsche*, LkiS: Yogyakarta, 2011. Hlm: 138-156.

dalam hidupnya. Moralitas kawanan ini menghindari perang dan konflik untuk mencapai kedamaian. Hal ini dilakukan mereka untuk memberi nilai pada hidupnya. Ketakutan mereka terhadap konflik dan nafsulah yang dapat membangun moralitas mereka.³⁴

Nietzsche lalu menunjukkan moralitas lain yang kepada individu-individu ini agar mereka tidak terbelenggu oleh moralitas kawanan. Moralitas ini adalah moralitas tuan. Moralitas tuan adalah yang dibangun berdasarkan semangat afirmatif setiap orang terhadap hidup. Semangat ini mencerminkan semangat dionisian yang selalu berkata “YA” pada hidup. Berbeda dengan moralitas kawanan yang menuntut individu untuk hidup berdasarkan moralitas yang satu dan seragam dengan moralitas individu lainnya, dalam moralitas tuan individu yang mencerminkan semangat dionisian harus hidup berdasarkan moralitasnya sendiri.³⁵

Menyoal etika tidak berhenti di situ saja, pada tahun 600 SM pembicaraan mengenai etika dimunculkan kembali oleh murid-murid **Phytagoras** yang terkenal dengan sebutan golongan Orpisme. Pembicaraan mereka diberi nama Agama Misteri Yunani yang di antaranya terdapat ungkapan bahwa “hakikat intelektual lebih tinggi dari pada hakikat sensual”. Hakikat intelektual adalah berkaitan dengan pengabdian terhadap sikap mental. Siapa yang dapat mengabdikan dirinya pada sikap mental dia lah yang akan memperoleh kehidupan yang terbaik. cara untuk meraihnya adalah dengan hidup dalam kesederhanaan.

³⁴Moralitas budak ini selalu mengikuti kelompok dan tidak berani untuk bertindak sesuai keinginan dirinya sendiri. Moralitas ini dibatasi oleh sistem yang diciptakan untuk melindungi masyarakat dari kehancuran dan kekacauan. Individu-individu dalam moralitas kawanan ini bersedia menerima moralitas ini karena mereka tidak menggunakan kesadarannya untuk menerima kebenaran moralitas. Individu-individu ini dibius dengan nilai –nilai yang menjamin keberlangsungan moralitas dan salah satu nilai itu adalah ketaatan individu kepada otoritas. **St. Sunardi**, *Nietzsche*, Ibid: 76

³⁵Bagi **Nietzsche**, moralitas tuan adalah moralitas yang melampaui kategori-kategori baik dan jahat. Seorang dionisian, harus mengukur suatu nilai dengan ketagori baik dan jelek bukan baik dan jahat. Baik adalah apa saja yang meningkatkan kehendak untuk berkuasa sedangkan jelek adalah semua yang keluar dari sikap yang lemah. Seorang donisian harus berperang untuk menunjukkan garis hidupnya yang selalu meningkat. Hal ini penting baginya karena dia akan merasa semakin kuat, otonom dan bebas. Meskipun moralitas kawanan ini buruk, Nietzsche tidak ingin moralitas ini hilang atau musnah. Hal ini menurutnya, dibutuhkan agar para dionisian tetap mempunyai musuh dan dapat berdiri di atas pundak para moralitas kawanan ini. Selain itu, keberadaan moralitas ini sebagai musuh para dionisian juga dapat meningkatkan kehendak untuk berkuasa.

Hidup kesederhanaan terbagi menjadi 3 (tiga) macam: *pertama*, sederhana dalam berpakaian. Sebelum pakaian dikenakan orang sering melihat bagaimana pakaian itu bagus, mewah, menarik dan lain sebagainya namun jika sudah dikenakan orang lain tidak lagi memandang nilai baju itu tetapi nilai dari perilaku orang yang bersangkutan. Oleh karena itu sederhana dalam berpakaian sangat menentukan keadaan seseorang. *kedua*, sederhana dalam berbicara. Akan membuang-buang waktu saja jika hanya menjalani hidup dengan banyak bicara namun tidak ada tindakan. Berbicara seperlunya saja dengan diimbangi action yang maksimal. *Ketiga*, sederhana dalam makan dan minum. Nabi menganjurkan untuk membagi porsi perut menjadi sepertiga bagian, yaitu sepertiga pertama untuk makan, kemudian untuk minum, dan sepertiga lainnya untuk bernafas.

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Setiap kebudayaan masing-masing mempunyai konsep etika. Penganut suatu kebudayaan memang menyetujui konsep etika di tempat ia tinggal. Akan tetapi, konsep etika yang lahir di luar diri setiap

individu akan mudah dilanggar. Etika dasar mengajarkan tentang moralitas, moralitas adalah perkara baik-buruk. Tidak sesederhana itu, etika titik tekannya bukan sekedar persoalan baik-buruk, benar salah, tetapi, lebih bersifat membangun kesadaran. Pada dasarnya kita sebagai manusia, tidak tahu pasti apa yang dinamakan baik-buruk tersebut. Bisa jadi apa yang kita anggap selama ini sebagai suatu kebaikan atau suatu keburukan hanyalah sebuah persetujuan universal. Tanpa kita ketahui apa yang menjadi jaminan kebenaran tersebut. Kesadaran dalam memilih suatu keputusan tindakan lebih penting. Etika, mengantarkan manusia untuk memilih suatu tindakan keputusan tindakan dengan rasional dan penuh kesadaran, hingga ia mampu mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari keputusan tindakannya.

Bagaimana penerapan etika di Indonesia? Orang-orang Indonesia sudah mempunyai dasar moral yang lembut, bila dilihat dari konsep ajaran. Perealisasiannya, masih banyak yang bagaikan manusia bar-bar. Bahkan tak jarang orang Indonesia berbuat suatu tindakan yang buruk dan berapologi bahwa ia melakukannya tidak sadar. Dalam bidang kehidupan yang lebih besar, masih banyak orang Indonesia yang bertindak tanpa kesadaran akan konsekuensi. Bidang politik misalnya, banyak pejabat politik yang hanya mengkultus tahta dan kekuasaan tanpa sadar tanggung jawabnya sebagai pengemban amanah rakyat. Hingga akhirnya politik di Indonesia hanya menjadi politik transaksional. Begitu pun dalam bidang hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), banyak orang Indonesia yang lebih mementingkan legalitas formal sebagai ukuran suatu kebenaran. Bila syarat-syarat legalitas formal sudah terpenuhi, seorang terdakwa suatu kasus hukum akan dinyatakan tak bersalah sekalipun sebenarnya ia bersalah. Penyodoran syarat-syarat legalitas tersebut tanpa disertai kesadaran dan kepekaan hati nurani.

Sudah terlalu lama Indonesia terjerembab dalam pengaruh luaran yang sebagian besar tidak cocok bagi pribadi bangsa Indonesia. Pribadi bangsa Indonesia yang dahulu terbentuk berdasarkan ajaran budaya yang luhur mempunyai ajaran kebaikan yang luhur pula. Selayaknya ditambahkan pula di dalam setiap pribadi konsep etika dasar. Konsep etika semestinya diterapkan sejak dini dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Hingga akhirnya kita sadar konsekuensi

dari perbuatan kita, dan label sebagai negara yang berbudi luhur bisa dipertanggungjawabkan.

11. Sejarah Akhlak Sebagai Sebuah Ilmu Etika.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa ilmu akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia untuk dinilai apakah perbuatan manusia tersebut tergolong perbuatan baik, mulia, terpuji, atau sebaliknya, yakni buruk, hina, dan tercela. Selain itu dalam ilmu ini dibahas pula ukuran kebahagiaan, keutamaan, kebijaksanaan, keindahan dan keadilan.³⁶ Yang merupakan persoalannya, mulai kapanakah munculnya pembicaraan tentang masalah akhlak / etika tersebut dan bagaimanakah perkembangannya sehingga sampai kepada masa arab sebelum islam bahkan sampai sekarang.

Sejarah mencatat, pada zaman kuno orang telah mengetahui keragaman moral. Misalnya **Hecataeous** dari **Miletus** (550-480 SM) membawa cerita aneh, **Herodotus** (485-430 SM) Danius raja Persia kuno menceritakan bahwa orang Callatian suatu suku India selalu memakan orang yang telah meninggal ada juga yang membakarnya. Untuk mengetahui sejarah akhlak dan etika, dari zaman Yunani sampai Arab sebelum Islam dapat dibagi menjadi beberapa masa, diantaranya; akhlak pada bangsa Yunani, akhlak pada agama Nasrani, Akhlak pada bangsa Romawi (abad pertengahan), dan akhlak pada bangsa Arab (sebelum Islam).³⁷

Akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya **Shopisticians**, yaitu orang-orang bijaksana (500-450 SM). Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak, melainkan pada masa itu perhatian bangsa Yunani tercurah kepada penyelidikannya mengenai alam.

Dasar yang dipergunakan para pemikir Yunani dalam membangun Ilmu Akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia,

36 **Mujtaba Mishbah**, *Daur Ulang Jiwa*, Al-Huda: Jakarta, Cet.1, 2008, Hlm:201. Mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas seputar akhlak baik dan buruk serta sifat terpuji dan tercela, berikut sifat-sifat yang harus diperkuat atau dihilangkan. Ilmu akhlak berbicara tentang sifat-sifat, semisal kedermawanan atau kekikiran, keberanian atau kepengecutan, yang muncul dan hilang berdasarkan ikhtiar kita atau yang dapat dikendalikan manusia. Kemudian secara lebih singkat lagi ilmu akhlak didefinisikan sebagai *pengenalan terhadap kemuliaan akhlak dan ketercelaannya*. Lihat dalam: **M. T. Misbah Yazdi**, *Meniru Tuhan*, Al-Huda: Jakarta, Cet. 1, 2006, Hlm: 5.

³⁷ **K. Bertens**, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius: Yogyakarta, 1999, hlm: 33.

atau pemikiran tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa Ilmu Akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis. Masalah akhlak adalah sesuatu yang *fitri*, yang akan ada dengan adanya manusia sendiri, dan hasil yang didapatnya adalah ilmu akhlak yang berdasar pada logika murni. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosof Yunani itu secara redaksional berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani, agar menjadi nasionalis yang baik lagi merdeka dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya.

Sejarah mencatat, bahwa filosof Yunani yang pertama kali mengemukakan pemikiran di bidang akhlak ialah **Socrates** (469-399 SM).³⁸ **Socrates** dipandang sebagai perintis Ilmu Akhlak, karena ia yang pertama kali berusaha sungguh-sungguh membentuk pola hubungan antarmanusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Namun demikian para peneliti mengatakan bahwa **Socrates** tidak menunjukkan dengan jelas tentang tujuan akhir dari akhlak dan tidak memberikan patokan-patokan tentang ukuran perbuatan untuk menghukumnya baik atau buruk. Maka timbul beberapa golongan yang mengemukakan berbagai teori tentang akhlak yang dihubungkan pada **Socrates**. Golongan terpenting yang lahir setelah **Socrates** dan mengaku sebagai pengikutnya ialah **Cynics** dan **Cyrenics**. Golongan **Cynics** dibangun oleh **Antithenes** (444-370 SM). menurut golongan ini bahwa ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan.³⁹

Sebagai konsekuensinya, golongan ini banyak mengurangi kebutuhannya terhadap dunia sedapat mungkin, rela menerima apa adanya, suka menanggung penderitaan, tidak suka terhadap kemewahan, menjauhi kelezatan, tidak peduli dengan cercaan orang, yang penting ia dapat memelihara akhlak yang mulia. pandangan golongan ini akan kita jumpai pada sufi dan filosof Islam. **Al-Ghazali** melalui teorinya yang disebut "*al-takhalluq bil akhlaq Allah 'ala thaqah basyariyah*", yaitu budi pekerti dengan budi pekerti **Allah** menurut kadar kesanggupan manusia, dan juga pada pandangannya mengenai "*tawakkal, ridla, ikhlas, zuhud, dan wara*" sebagaimana kita lihat dalam kitabnya "*Ihya 'Ulum ad-Din*" telah menggambarkan adanya akhlak tersebut.

³⁸ **Mustafa**, *Akhlak Tasawuf*, Pustaka Setia: Bandung, 1997, Hlm. 41.

³⁹ **Mustafa**, *Akhlak Tasawuf*, Ibid: 145.

Diantara pemimpin golongan Cynics yang terkenal adalah Diogenes, meninggal 323 SM. Ia mengajarkan kepada para muridnya supaya membuang kebiasaan manusia. Ia sendiri memakai pakaian compang-camping, makan makanan yang sederhana dan tidur di atas tanah. Adapun golongan Cyrenics dibangun oleh Aristippus yang lahir di Cyrena (kota Barka di utara Afrika) Golongan ini berpendapat bahwa mencari kelezatan dan menjauhi kepedihan adalah merupakan satu-satunya tujuan hidup yang benar. Menurutnya perbuatan yang utama adalah yang tingkat dan kadar kelezatannya lebih besar dari pada kepedihan. Dengan demikian menurutnya kebahagiaan dan keutamaan itu terletak pada tercapainya kelezatan dan mengutamakan.

Kedua golongan tersebut di atas sama-sama membicarakan perbuatan yang baik, utama dan mulia. Namun ukuran yang mereka gunakan berbeda. Golongan pertama Cynics bersikap memusat pada Tuhan (*teo-centris*) dengan cara manusia berupaya mengidentifikasi sifat Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang wujudnya tampil dengan seorang Zahid. Sedangkan golongan kedua Cyrenics bersikap memusat pada manusia (*anthropocentris*) dengan cara manusia mengoptimalkan perjuangan dirinya dan memenuhi kelezatan hidupnya. Namun terlepas aliran mana yang diikuti, kedua aliran tersebut telah berbicara tentang akhlak yang mulia.

Pada tahap selanjutnya datanglah **Plato** (427-347 SM). Diantara bukunya yang mengandung ajaran akhlak adalah Republik. Pandangannya dalam bidang akhlak berdasarkan pada teori contoh. Apa yang lahiriah sebenarnya telah ada contohnya terlebih dahulu, lahiriah hanya sebagai bayangan atau foto copy dari contoh yang tidak tampak (alam rohani atau idea). Dalam pandangan akhlaknya itu, **Plato** tampak berupaya memadukan antara unsur yang datang dari diri manusia sendiri, dan unsur dari luar. Unsur dari diri berupa akal pikiran dan potensi rohaniah lainnya, sedangkan unsur dari luar berupa pancaran nilai-nilai luhur dari yang bersifat mutlak. Paduan dari kedua unsur inilah yang membawa manusia menjadi orang yang utama.

Sejalan dengan itu, **Plato** berpendapat bahwa di dalam jiwa manusia terdapat kekuatan yang bermacam-macam, dan perbuatan yang utama timbul dari kemampuan membuat pertimbangan dalam mendayagunakan potensi kejiwaan pada hukum akal. Menurutnya bahwa pokok-pokok keutamaan ada empat, yaitu hikmah (kebijaksanaan), keberanian, keperwiraan dan keadilan.

Kemudian datang **Aristoteles** (394-322 SM). Seorang murid **Plato**, dia mempelajari akhlak (etika) dan berpendapat bahwa tujuan akhir yang dikehendaki oleh manusia dari apa yang dilakukannya adalah kebahagiaan. Menurutnya jalan untuk mencapai kebahagiaan ini adalah mempergunakan akal sebaik-baiknya. Aristoteles berpendapat bahwa apa yang berhubungan dengan keutamaan tidak cukup dengan diketahui apakah keutamaan itu? Bahkan harus ditambah dengan melatih dan mengerjakannya, atau mencari jalan lain untuk menjadikan kita orang-orang utama dan baik.

Aristoteles dikenal dengan teorinya moderasi (di kalangan tradisi Islam dikenal dengan istilah *al-Wasath*), yang mengatakan bahwa moral yang baik adalah sesungguhnya identik dengan memilih segala sesuatu yang bersifat “pertengahan”. Menurutnya tiap-tiap keutamaan ialah pertengahan antara dua keburukan, seperti dermawan merupakan tengah-tengah dari boros dan kikir.

Selanjutnya pemikir akhlak dari Yunani adalah **Stoics** dan **Epicurus**. Keduanya berbeda pandangan mengenai kebaikan. **Stoics** berpendirian sebagaimana paham **Cynics**, pandangannya ini banyak diikuti oleh ahli filsafat di Yunani dan Romawi dan pengikut-pengikutnya yang termasyur pada permulaan kerajaan Romawi antara lain **Seneca** (65-65M), **Epictetus** (60-140 M) dan **kaisar Marcus Orleus** (121-180 M).

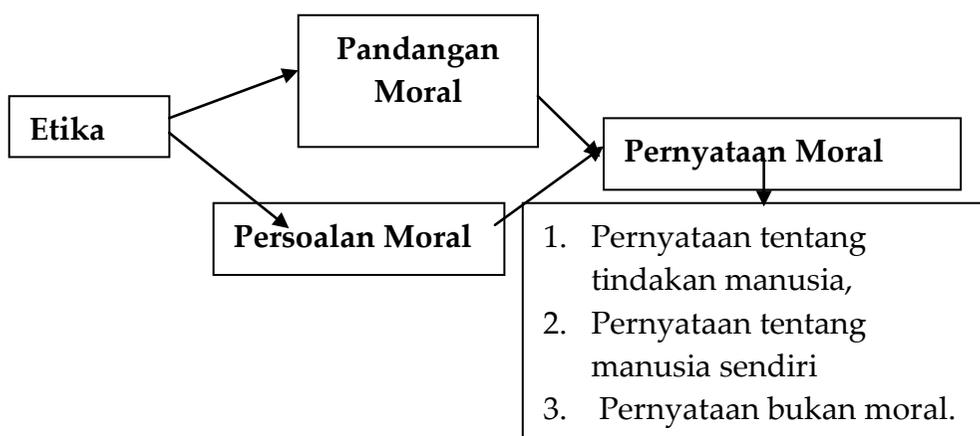
Adapun Epicurus mendasarkan pemikirannya pada paham Cyrenics. Paham mereka banyak diikuti di zaman baru ini, seperti **Gassendi** (1592-1656 M) / **Gancogne** (1592-1655 M), seorang filosof Perancis. Dia membuka sekolah dan menghidupkan paham **Epicurus**, diantara muridnya ialah Moulriere.

Epicuros (314-270 SM) membedakan keinginan menjadi dua, keinginan alami yang perlu dipenuhi dan keinginan yang tidak perlu dipenuhi. Ajaran akhlak yang dikemukakan para pemikir Yunani keseluruhannya tampak bersifat rasionalistik. Penentuan baik dan buruk didasarkan pada pendapat akal pikiran yang sehat dari manusia. Karenanya tidaklah salah kalau dikatakan bersifat *anthropocentris*. Pendapat akal yang demikian dapat saja diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

12. Objek dan Kajian Etika.

Obyek etika menurut **Franz Magnis Suseno**⁴⁰ adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanya dua macam, yakni; pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud, dan watak. Ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat moral, tetapi penting dalam rangka pernyataan tentang tindakan.

Skemanya adalah sebagai berikut :



Dalam melihat skema tersebut **Ahmad Charis Zubair**⁴¹ dalam perinciannya adalah :

1. Dalam beberapa pernyataan kita mengatakan bahwa suatu tindakan tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma moral dan oleh karena itu adalah betul, salah, dan atau wajib. Contoh: “Engkau harus mengembalikan uang itu”. “Mencuri itu salah”, “Perintah jahat tidak boleh ditaati”, disebut pernyataan kewajiban.
2. Orang, kelompok orang dan unsur-unsur kepribadian (motif, watak, maksud, dan sebagainya) kita nilai sebagai baik, buruk, jahat, mengagumkan, suci, memalukan, bertanggung jawab, pantas ditegur, disebut : pernyataan penilaian moral.

⁴⁰ **Frans Magnis Suseno**, *Etika Sosial*, Op cit: 45.

⁴¹ **Achmad Charris Zubair**, *Kuliah Etika*, Rajawali Pers: Jakarta, 1987, hlm: 45. Penulis menambhakan dari pendapatnya Achmad Chariris Zubair, bahwa Pernyataan kewajiban tidak mengenal tingkatan. Wajib atau tidak wajib, betul atau salah, tidak ada tengahnya. Penilaian moral dan bukan moral mengenal tingkatan. Mangga dapat agak enak, enak sekali. Watak dapat amat jahat atau agak jahat; dan sebagainya.

3. Himpunan pernyataan ketiga yang harus diperhatikan adalah penilaian bukan moral. Contoh: Mangga itu enak, Anak itu sehat. Mobil itu baik, Kertas ini jelek, dan sebagainya.

c. Objek Etika Umum.

Pada umumnya kita sepakat jika dikatakan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan. Akan tetapi tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan itu adalah ilmu. Suatu kumpulan pengetahuan untuk bisa disebut ilmu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah *objek material* dan *objek formal*. Pada dasarnya setiap bidang ilmu, apakah itu ilmu khusus maupun ilmu filsafat, harus memiliki dua macam objek tersebut. Menurut **Poedjawijatna**⁴² lapangan penyelidikan etika memang manusia, tetapi berbedalah etika dengan misalnya ilmu manusia, karena ilmu manusia menyelidiki manusia itu dari sudut 'luar'. Ilmu budaya pun berbeda dengan etika, sebab walaupun ilmu budaya itu menyelidiki manusia, tetapi pandangannya khusus diarahkan kepada kebudayaannya. Etika memang mempunyai sudut penyelidikannya sendiri terhadap manusia yang menjadi lapangan penyelidikan beberapa ilmu lain.

Dari aspek mana saja manusia, yang juga dapat dipandang sebagai benda alam, dijadikan objek ilmu? Biologi memandang manusia dengan tindakannya yang ditentukan oleh keadaan manusia itu sebagai benda alam, tetapi psikologi menyoroti manusia yang sama itu dari sudut lain. Sejarah menyoroti manusia bukan sebagai manusia seseorang, melainkan dalam kelompoknya, bagaimana kelompok itu berkembang dan bertindak.

Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu hal yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret (misalnya manusia, tumbuhan, batu) atau pun hal-hal yang abstrak (misalnya ide-ide, nilai-nilai, kerohanian). Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain. Satu objek material bisa ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga

⁴²Poedjawijatna, *Tahu dan Pengetahuan: Pengantar Ke Ilmu dan Filsafat*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004, Hlm: 14-15.

menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya objek materialnya adalah "manusia" dan manusia itu ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia di antaranya: psikologi, antropologi, sosiologi.⁴³

Dengan demikian jelas bahwa ada benda yang diselidiki yang merupakan lapangan penyelidikan dan mungkin ada sudut penyelidikan. Dalam objek yang sama maka lapangan penyelidikan itu disebut: objek material, sedangkan sudut dari mana objek material itu disoroti disebut objek formal. Objek formallah yang menentukan macam ilmu jika ada beberapa ilmu yang mempunyai objek material yang sama.⁴⁴

Istilah objek material sering juga dijumpukan atau dianggap sama dengan pokok persoalan (*subject matter*). Pokok persoalan ini perlu dibedakan atas dua arti. Arti pertama, pokok persoalan dapat dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual. Misalnya penelitian tentang atom termasuk bidang fisika; penelitian tentang *chlorophyl* termasuk penelitian bidang botani atau biokimia; penelitian tentang bawah sadar termasuk bidang psikologi. Arti kedua, adalah sebagai pokok persoalan dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Anatomi dan fisiologi, keduanya bertalian dengan struktur tubuh. Anatomi mempelajari strukturnya, sedangkan fisiologi mempelajari fungsinya. Kedua ilmu tersebut dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, namun juga dapat dikatakan berbeda. Perbedaan ini dapat diketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak pertanyaan yang diajukan dan aspek-aspek yang diselidiki dari tubuh tersebut. Anatomi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang statis, sedangkan fisiologi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang dinamis.⁴⁵

Jika dalam filsafat apa yang disebut sebagai objek materialnya adalah segala hal yang memiliki sifat fundamental yang disebut "ada" dan objek formalnya adalah substansi dan esensi dari segala yang "ada" tersebut, maka dalam etika objek materialnya adalah tingkah laku atau perbuatan manusia (perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas), sedangkan objek formalnya adalah kebaikan dan keburukan, atau

⁴³Bryan S. Turner, *Menggugat Sosiologi Sekuler: Atudi Analisis Atas Sosiologi Weber*, Suluh Press: Yogyakarta, 2005.

⁴⁴Poedjawijatna, *Tahu dan Pengetahuan: Pengantar Ke Ilmu dan Filsafat*, Op cit: 20-25.

⁴⁵Burhanudin Salam, *Logika Materiil: Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Rineka Cipta: Jakarta, 1997, Hlm: 2-10.

bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak bebas tidak dapat dikenai penilaian bermoral atau tidak bermoral. Memang harus diakui, sekarang ini ilmu berkembang dengan sangat pesat, demikian pula jumlah cabang-cabangnya. Hasrat untuk menspesialisasikan diri pada satu bidang telaahan yang memungkinkan analisis yang makin cermat dan saksama menyebabkan objek formal (objek ontologis) dari disiplin keilmuan menjadi kian terbatas. Diperkirakan sekarang ini terdapat sekitar 650 cabang keilmuan yang kebanyakan belum dikenal oleh orang-orang awam.⁴⁶

Cabang-cabang ilmu tersebut pada dasarnya berkembang dari dua cabang utama, yakni filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam (*the natural sciences*) dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial (*the social sciences*). Ilmu-ilmu alam membagi diri kepada dua kelompok lagi yakni ilmu alam (*the physical sciences*) dan ilmu hayat (*the biological sciences*).

d. Nilai, Norma Sebagai Objek Etika.

Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai. Nilai (*value*) adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan masalah penting yang dibahas oleh filsafat, tepatnya oleh cabang filsafat aksiologi yang disebut sebagai *problems of human values*. Aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat nilai, yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Cabang filsafat ini merupakan satu dari tiga cabang pokok, dua lainnya ontologi dan epistemologi. Nilai harus dibedakan dengan harga, sesuatu yang bernilai belum tentu berharga, tetapi sesuatu yang berharga dapat dipastikan bernilai.

Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat dan diyakini kebenarannya itulah yang disebut nilai. Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, berarti sesungguhnya objek yang diberi penilaian

⁴⁶ **Jujun S. Suriasumantri**, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan: Jakarta, 2007, Hlm: 95-98.

tersebut tidak tunggal. Objek di sini dapat berupa suatu yang bersifat jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap dan tindakan tertentu.

Dalam menilai, subjek berhadapan dengan objek. Sehingga pada hakikatnya subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai, misalnya apakah nilai itu positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian itu, subjek dapat menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya:

1. Indera yang dimilikinya, menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan;
2. Rasio, menghasilkan nilai benar dan salah;
3. Rasa etis, menghasilkan nilai baik-buruk atau adil-tidak adil;
4. Rasa estetis, menghasilkan nilai indah dan tidak indah;
5. Iman, menghasilkan nilai suci-tidak suci dan haram-halal

Louis O. Kattsoff,⁴⁷ membedakan nilai dalam 2 macam :

1. Nilai intrinsik, nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai
2. Nilai instrumental, nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu.

Walter G. Everet,⁴⁸ menggolongkan nilai-nilai dalam delapan kelompok yaitu :

1. Ekonomis (harga dalam jual beli)
2. Kejasmanian (kesehatan)
3. Hiburan
4. Sosial (dari bentuk-bentuk perserikatan manusia)
5. Watak (integritas kepribadian)
6. Estetis (keindahan alam dan karya seni)
7. Intelektual
8. Keagamaan

Notonagoro, membagi menjadi 3 kelompok, yakni :

1. Nilai Material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
2. Nilai Vital, berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan (beraktivitas)
3. Nilai Kerohanian, berguna bagi rohani manusia, nilai rohani dibedakan menjadi :
 1. Nilai kebaratan atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia

⁴⁷ **Louis O. Kattsoff**, *Pengantar Filsafat*, Sinar Harapan: Jakarta, 19980.

⁴⁸ **Louis O. Kattsoff**, *Pengantar Filsafat*, Ibid.

2. Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa (estetis) manusia
3. Nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia
4. Nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budinya.

Sutan Takdir Alisjahbana, membedakan nilai dalam beberapa kategori :

1. Nilai teori, nilai yang menentukan dengan objektif identitas benda-benda dan kejadian-kejadian alam sekitar guna mendapatkan pengetahuan.
2. Nilai ekonomi, nilai yang menentukan pemakaian atau penggunaan benda-benda dan kejadian-kejadian di alam guna berlangsung secara efisien untuk kebutuhan manusia.
3. Nilai agama, proses penilaian terhadap alam dihadapi dengan penuh kekaguman terhadap kebesaran alam semesta.
4. Nilai seni, proses penilaian terhadap alam dituangkan dalam wujud ekspresi rasa keindahan.
5. Nilai kuasa, dilandasi pada otoritas untuk menundukkan orang lain.
6. Nilai solidaritas, bersifag menghargai manusia lain dengan hubungan cinta, persahabatan dan simpati.

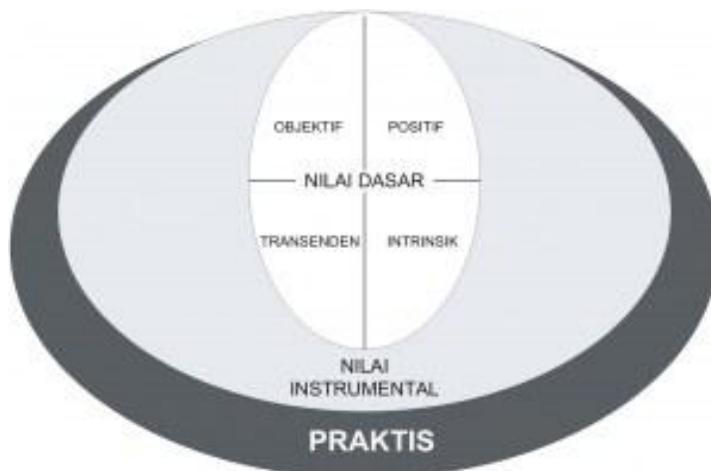
Kombinasi nilai teori dan nilai ekonomi sangat menentukan kemajuan suatu masyarakat. Kombinasi nilai agama dan nilai seni merupakan aspek ekspresif dari kebudayaan. Pengelompokan jenis nilai secara lebih sederhana, maka ada 5 pasangan nilai yang utama yang bersifat antinomis, yakni :

1. Objektif dan Subjektif: Nilai objektif adalah kualitas yang dilihat dari kondisi sebenarnya. Nilai objektif tidak dapat dipisahkan dari subjek yang menilai. Subjek dapat berupa individu, kelompok masyarakat, suatu bangsa atau universal. Nilai yang diberikan oleh subjek disebut nilai subjektif.
2. Positif dan Negatif: Nilai positif adalah nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia contoh nilai kebaikan, keindahan, kesusilaan. Sebaliknya nilai-nilai kejahatan, keburukan, ketidaksusilaan adalah contoh dari nilai negatif. Pasangan nilai positif dan negatif tersebut merupakan antinomi yakni pasangan nilai yang kontradiktif tetapi satu sama lain tidak dapat meniadakan.
3. Intrinsik dan Ekstrinsik: Setiap objek mengandung kualitas tertentu, kualitas atau nilai demikian disebut nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik adalah nilai yang berdiri sendiri. Nilai ekstrinsik yang berarti nilai susila yang harus dihubungkan dengan hal-hal lain diluar tindakan itu yakni konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut.

4. Transenden dan Imanen: Nilai imanen adalah nilai yang terkait dengan pengalaman dan pengetahuan manusia. Sebaliknya nilai transenden adalah nilai yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia
5. Dasar dan instrumental: Nilai dasar adalah nilai yang dipilih (sebagai landasan bagi nilai instrumental) untuk diwujudkan sebagai kenyataan (praktis). Nilai dasar yang dipilih pada umumnya adalah refleksi dan berhubungan dengan nilai-nilai yang objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Nilai dasar ini karena telah dipilih cenderung bersifat tetap.

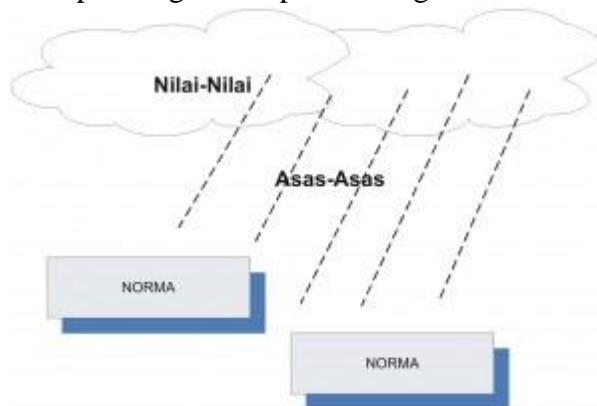


Unsur-Unsur Nilai Dasar



Tataran Nilai dan Praktis

Sekalipun norma itu semakin banyak dan kompleks, keberadaannya tidak boleh sampai mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika sampai mengganggu, berarti norma-norma itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Artinya norma-norma itu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (taat asas). Asas lebih konkret dari nilai, tetapi kurang konkret dibandingkan dengan norma. Nilai adalah kristalisasi dari hal-hal yang dianggap baik, kristalisasi dari nilai-nilai masih abstrak karena ada dalam jiwa atau pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang.



Hubungan Nilai, Asas dan Norma

Sebelumnya telah disinggung mengenai tiga pembagian norma yaitu, kesusilaan (moral), hukum dan kebiasaan. Norma moral adalah norma yang ideal sedangkan norma kebiasaan merupakan fakta atau kenyataan. Norma hukum berada di antara ketegangan-ketegangan tersebut. Norma hukum bertugas menyeimbangkan antara tuntutan yang ideal dan yang nyata. Jika tidak, norma hukum akan kehilangan daya berlakunya secara filosofis dan sosiologis. Norma hukum yang baik adalah norma hukum yang memang dicita-citakan (filosofis), diterima oleh masyarakat (sosiologis) dan memenuhi semua prosedur dan syarat-syarat yuridis. Ketiga penerimaan ini sekaligus melambangkan tiga nilai dasar hukum yaitu: Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian Hukum. Ketiga nilai ini sekaligus menjadi tujuan dari hukum.

D. Teori Etika.

4. Teori Idealisme-Etis.

Pengakuan kebenaran atas suatu teori dapat diamati dari 2 hal yaitu **dari apa yang dinyatakan** atau **dari siapa yang**

mengatakannya. Kriteria pertama berada dalam wilayah filsafat ontologi, sementara kriteria ke dua berada dalam wilayah etika. Perenungan (*kontemplasi*) terhadap moralitas merupakan kegiatan beretika. Berkaitan dengan perenungan tersebut, terdapat beberapa orientasi, yang sering disebut sebagai teori etika. Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu: Idealisme etis; Deontologis etis; serta, Teleologisme etis.

Istilah "*idealisme*"⁴⁹ muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu yang adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme diyakini memiliki implikasi-implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme-etis. Idealisme dalam kancah ontologi bertolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki ide dan ideal yang mempengaruhi materi (pengalaman), bukan sebaliknya. Dalam hal ini idealisme tidak bermaksud untuk meningkari keberadaan materi, hanya saja untuk mengetahui materi itu, orang terlebih dulu menggunakan idenya.⁵⁰

Dalam pandangan **H. De Vos**,⁵¹ idealisme dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Idealisme rasionalistis: Idealisme rasionalistis, beranggapan bahwa rasio atau akal budi manusialah yang mengenal norma-norma dalam bersikap dan berperilaku bagi seorang manusia. Rasio memberikan

49 Idealisme merupakan aliran filsafat dimana lebih mengedepankan ide dari materi. Dengan kata lain, idealisme merupakan paham di mana ide adalah primer dan materi adalah sekunder. Idealisme berasal dari kata Latin yaitu *Idea* yang berarti gagasan (*ide*), sesuai dengan arti kata asalnya idealisme menekankan pada gagasan, ide, isi pikiran dan buah mental. Adapun yang nampak dianggap kalah benar, kalah nyata dan kalah berani. Dalam etika idealisme berpendapat bahwa nilai etis yang baik adalah hal mental, perkara spiritual, yang baik bukanlah ada pada hidup perilaku dan perbuatan nyata melainkan ada dalam angan-angan pikiran dan budi. Lihat dalam: **A. Mangunhardjana**, *Isme-isme Dari A Sampai Z*, Kanisius: Yogyakarta, 1997, hlm: 100.

⁵⁰ Teori Idealisme-Etis ini penulis ambil dari intisari pemikiran **J Sudarminta**, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetantahuan*, Kanisius: Yogyakarta, 2002, hlm: 176-177. Istilah Idealisme Etis ini dipakai antara lain oleh **Sorley dan Messer**, **William Ritchie**, yang dikenal dengan *philosophy of spirit*-nya yang menekankan arti kepada manusia sebagai makhluk berdimensi jasmani dan rohani. Dalam hal ini rohani (*spirit*) merupakan *ultimate reality* yang paling menentukan daripada rasio dan pengalaman. Semua benda yang tidak termasuk yang tidak bernyawa sekalipun menurut penemu istilah ini, memiliki semacam kehidupan spiritual. Lihat dalam: **Lorens Bagus**, *Kamus Filsafat*, Op cit: 302.

⁵¹ **H. De Vos**, *Pengantar Etika*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 1987, hlm: 203-210.

pengertian tentang mana yang baik dan buruk, sehingga manusia menjadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Idealisme rasionalistis menyatakan bahwa rasio berperan dalam menentukan tujuan perilaku manusia:

2. Idealisme estesis; Disisi lain menyatakan bahwa alam ini termasuk manusia, hidup dalam keselarasan yang estetik. Manusia (mikrokosmos) adalah bagian dari jagad alam yang luas (makrokosmos). Tujuan dari setiap perilaku manusia adalah keinginan untuk hidup selaras dengan alam itu. Ide inilah yang menggerakkan sekaligus memberi bentuk setiap perilaku manusia.
3. Idealisme etis; Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilakunya. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia.

Aliran filsafat idealisme terbagi menjadi dua kategori, yakni idealisme objektif dan idealisme subjektif.⁵² Idealisme objektif memandang bahwa terdapat ide yang berada di luar eksistensi manusia dan alam semesta, semua yang material adalah hasil karya ide yang berada di luar manusia. Segala bentuk fenomena alam maupun fenomena sosial adalah hasil rekayasa ide obyektif tersebut. Sementara itu, Idealisme subjektif memandang bahwa dunia materi adalah sensasi-sensasi manusia, sedangkan pikiran dan perasaan adalah satu-satunya zat (substansi) yang *riil*. Orang yang selalu menumpukan harapan-harapan kepada ide manusia adalah contoh orang yang menganut idealisme subyektif.

J.G. Fichte (1762-1814), memandang *idealisme* sebagai Aku yang otonom dan merdeka serta menempatkan diri (*thesis*) menjadi sadar dan dalam pada itu Aku menempatkan obyek dihadapannya ialah bukan Aku, ini disebutnya *antithesis*. Bukan Aku ini adalah tergantung pada Aku, karena hanya pertentangan belaka. Adapun fungsinya tidak lain merupakan rintangan yang harus diatasi (oleh Aku), batasan yang harus dilewati dan saat yang harus dipergunakan Aku untuk selalu berkembang. Demikianlah pandangan filsafat idealisme Fichte, yang menganggap realitas diluar Aku sebenarnya tidak ada. Aku itulah satu-satunya realitas, satu-

⁵² <http://www.indo-marxist@yahoo.com>. Arti Dan Kategori Filsafat, diakses pada tanggal 06 Juni 2013.

satunya dasar keterangan dan dasar perenungan. Ide itulah yang merupakan keterangan segala realitas atau yang dianggap realitas.⁵³

F.W.J. Schelling (1775–1854), menafsirkan idealisme agak lebih obyektif, karena bukan-Aku (obyek) ini sungguh-sungguh ada. Obyek ini bukan hanya pertentangan belaka, melainkan memiliki nilai yang lebih positif. **Schelling** mengakui kesungguhan alam, bahkan dinyatakannya bahwa subyek yang berpikir (Aku) itu muncul dari pada alam. Aku yang muncul dari alam ini adalah Aku yang telah sadar, karena alam mengalami proses evolusi, yang mengeluarkan budi yang sadar, lambat laun sadar akan dirinya (Aku) dalam alam yang tak sadar. **Schelling** menganggap bahwa Tuhan adalah identitas yang mutlak, karena dari-NYA lah semua berawal. Kemudian dari-NYA lah muncul alam dalam bentuk yang makin tinggi derajatnya; bahan, gerak, hidup, susunan dunia, manusia dan dari budi pun kemudian memunculkan ilmu, moral seni, sejarah dan negara.⁵⁴

Para pemikir idealisme mengungkapkan bahwa negara merupakan kehendak dari individu-individu dalam masyarakat, negara merupakan perjanjian-perjanjian yang disepakati dari tiap individu dalam masyarakat, negara merupakan hak alamiah dari masyarakat untuk membangun sebuah lembaga yang akan melindungi individu-individu dalam masyarakat, dari kondisi inilah kemudian muncul negara.

John Locke (1632-1704), sebagai salah satu tokoh aliran filsafat idealisme berasumsi, bahwa asal-mula pemerintahan adalah suatu keadaan alamiah. Dalam keadaan alamiah itu terdapat hukum alam yang tidak lain berisi hukum Tuhan. Hukum alam itulah yang mengatur keadaan alamiah. Keadaan alamiah menurut **Locke** merujuk pada keadaan dimana manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tak ada rasa takut dan penuh kesetaraan. Manusia dalam keadaan alamiah juga tidak akan merusak kehidupan, kesehatan, kebebasan dan hak-hak kepemilikan manusia lainnya. Bagi aliran idealisme, negara merupakan keniscayaan alamiah dalam perkembangan masyarakat, negara merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap zamannya, untuk mengatur dan menselaraskan kehidupan individu-individu dalam masyarakat. Negara merupakan penjabaran ide

⁵³ **Poedjawijatna**, *Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat*, Rineka Cipta: Jakarta, 1997, hlm: 116.

⁵⁴ **Poedjawijatna**, *Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat*, Ibid: 118.

yang objektif dalam masyarakat, ide yang mampu menjamin keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk negara. Pandangan pemikir idealis inilah yang kemudian digunakan sebagian masyarakat kelas menengah keatas untuk memapankan posisi negara.

Tinjauan historis pada abad XVII dimana Prancis dan Inggris kala itu didominasi oleh wacana doktrin monarki absolut, secara eksplisit merupakan fakta objektif atas pengimplementasian filsafat idealisme dalam mengejawantahkan konsepsi negara sebagai kekuasaan absolut dari penjabaran ide-ide objektif. Dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut merupakan jawaban atas kekacauan sosial politik akibat perang saudara dan perang-perang agama.

Para teoretisi pembela hak-hak Ketuhanan Raja beranggapan bahwa monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kodrat dan hukum alam. Pertama, karena monarki absolut berakar pada tradisi otoritas paternal; kedua, sistem pemerintahan demikian merupakan *copy* Kerajaan Tuhan dimuka bumi; dan ketiga, monarki absolut merupakan cermin kekuasaan tunggal illahi atas segala sesuatu yang ada di dunia ini.

5. Teori Deontologi Etis.

Teori etika deontologis (*deontologisme-etis*) berpendapat bahwa baik-buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Deontologisme adalah inti dari perilaku baik harus didorong oleh itikad (kehendak) yang baik. Itikad baik muncul karena memang kewajiban atau yang lainnya. (**Immanuel Kant**).⁵⁵

Teori deontologis ini sering disebut dengan etika peraturan, etika peraturan menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “Apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?” (**Franz Magnis-Suseno**).⁵⁶

Etika deontologis adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan

⁵⁵Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Op cit: 59-60.

⁵⁶Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Op cit: 103-105.

prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Akar kata Yunani *deon* berarti 'kewajiban yang mengikat'. Istilah "*deontology*" dipakai pertama kali oleh **C.D. Broad** dalam bukunya *Five Types of Ethical Theory*. Etika deontologis juga sering disebut sebagai etika yang tidak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. (*non-consequentialist theory of ethics*).

Para penganut etika deontologis, seperti **Immanuel Kant** (1724-1804)⁵⁷ sebagai pelopornya misalnya, berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Misalnya norma moral "jangan bohong" atau "bertindaklah secara adil" tidak perlu dipertimbangkan terlebih dulu apakah menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional.

Menurut paham etika deontologis, pendekatan etika teleologis (entah dalam bentuk *egoisme*, *eudaimonisme* atau *utilitarisme*) yang menghubungkan kewajiban moral dengan akibat baik atau buruk, justru merusak sifat moral. Tidak berbohong hanya kalau itu menguntungkan si pelaku atau hanya bila itu membawa akibat baik yang lebih besar dari akibat buruknya, akan merendahkan martabat moral. Menurut Kant, manusia baru bersikap moral sungguh-sungguh apabila ia secara prinsipial tidak bohong, entah itu membawa keuntungan atau kerugian. Maka kaidah etika deontologis bisa dirumuskan sebagai berikut: Betul-salahnya suatu sikap atau tindakan tidak tergantung dari apakah sikap atau tindakan itu mempunyai akibat baik atau buruk, melainkan apakah sesuai dengan norma-norma atau hukum moral atau tidak.

Tujuan filsafat moral menurut **Kant** adalah untuk menetapkan dasar yang paling dalam guna menentukan keabsahan (*validitas*) peraturan-peraturan moral. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa dasar yang paling dalam ini terletak pada akal budi murni, dan bukan pada kegunaan, atau nilai lain. Moralitas baginya menyediakan kerangka dasar prinsip dan peraturan yang bersifat rasional dan yang mengikat serta mengatur hidup setiap orang, lepas dari tujuan-tujuan

57 **Emanuel Kant**, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, Translated by Thomas K. Abbott with an introduction by Marvin Fox, New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1949, p. 57.

dan keinginan-keinginan pribadinya. Norma moral mengikat setiap orang di mana pun dan kapan pun tanpa kecuali. Dasar moralitas mesti ditemukan dalam prinsip-prinsip akal budi (rasio) yang dimiliki secara umum oleh setiap orang. Suatu sikap atau tindakan secara moral betul hanya kalau itu sesuai dengan norma atau hukum moral yang dengan sendirinya mengikat setiap orang yang berakal budi.

Kant sangat menekankan pelaksanaan kewajiban moral demi tugas itu sendiri dan bukan demi tujuan-tujuan lain. Kalimat pertama dalam bukunya *Grundlegung zür Metaphysik der Sitten* (Prinsip-prinsip Dasar Metafisika Moral) adalah pernyataan bahwa yang baik sungguh-sungguh (tanpa syarat apa-apa) adalah kehendak baik. Ia sangat menekankan kemurnian motivasi sebagai ciri pokok tindakan moral, dan kemurnian ini nampak dari sikap mentaati kewajiban moral demi hormat terhadap hukum / norma yang mengatur tingkah lakunya, bukan demi alasan lain. Inilah faham deontologis murni. Setiap orang mesti bertindak tidak hanyasesuai dengan tugas dan kewajibannya tetapi juga demi tugas dan kewajibannya tersebut. Pelaksanaan tugas dan kewajiban moral karena itu dianggap menguntungkan untuk dirinya atau orang lain, dianggap tidak ada kaitannya dengan moralitas.

Karena tujuan menjaga kemurnian motivasi ini, maka Kant memberikan norma dasar moral yang melulu bersifat formal. Ia tidak menunjukkan apa yang secara konkret merupakan kewajiban manusia. Dengan kata lain, ia tidak memberi isi material tentang hal yang mesti dilakukan oleh seorang pelaku moral dalam situasi konkret. Norma dasar moral yang melulu bersifat formal itu dia sebut sebagai imperatif kategoris (perintah yang mengikat mutlak setiap makhluk rasional dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri). Rumusan pokok imperatif kategorisnya yang menegaskan prinsip universalisasi kaidah tindakan berbunyi sebagai berikut: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga prinsip atau kaidah tindakanmu itu bisa sekaligus kau kehendaki sebagai kaidah yang berlaku umum". Sedangkan rumusan keduanya yang menegaskan prinsip hormat terhadap manusia sebagai person atau pribadi yang bernilai pada dirinya sendiri adalah: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan entah dalam dirimu sendiri atau dalam diri orang lain senantiasa sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan tidak pernah melulu sebagai sarana."

6. Teori Teologisme Etis.

Teori teleologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung daripada ruginya. Untung rugi ini dilihat dari indikator kepentingan manusia. Teori ini memunculkan 2 pandangan, yaitu: Egoisme; serta, Utilitarianisme (Utilisme). Ada perbedaan yang mencolok dari kedua teori ini. Egoisme selalu menekankan keuntungan pada “saya pribadi saja” sementara utilitarianisme menekankan keuntungan pada “setiap orang, termasuk saya”. Di sini terlihat sisi humanisme ini sebenarnya merupakan penghalusan dari altruisme yang cenderung dinilai kurang realistis, yakni menekankan keuntungan bagi “setiap orang, kecuali saya”. Egoisme dapat dipecah dalam 2 jenis, yaitu egoisme etis dan egoisme psikologis.

Egoisme etis dapat didefinisikan sebagai teori etika yang menyatakan bahwa tolok ukur satu-satunya mengenai baik-buruk suatu perilaku seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan kebahagiaan dan kepentingannya di atas kebahagiaan dan kepentingan orang lain. Jadi, egoisme etis adalah suatu teori umum tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu apa yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi kita masing-masing.

Egoisme etis cenderung menjadi hedonistis, karena menekankan kepentingan dan kebahagiaan pribadi berdasarkan hal yang menyenangkan dan menyenangkan. Setiap perilaku yang menyenangkan (mendatangkan kenikmatan) bagi diri sendiri selalu dinilai sebagai perilaku yang baik dan pantas dilakukan. Sebaliknya, perilaku yang tidak mendatangkan kenikmatan bagi diri pribadi harus dihindari. Menurut egoisme-etis manusia seharusnya bertindak sedemikian rupa untuk mengusahakan kepentingan pribadinya tercapai dan menghindari sebaliknya.

Egoisme-psikologis adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh perilaku, demi kepentingan dirinya belaka. Egoisme ini disebut psikologis karena terutama mau mengungkapkan, bahwa motivasi satu-satunya dari manusia dalam melakukan perilaku apa saja adalah untuk mengejar kepentingannya sendiri.

Bab empat;
Merancang Model Pelayanan Publik
Untuk Pemerintahan Daerah: Pisau Analisis
Etika Administrasi Negara

C. Eksistensi Desentralisasi di Indonesia.

5. Dari Desentralisasi Menuai Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas⁵⁸ dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

⁵⁸Pemberian wewenang yang lebih luas tersebut, dapat diistilahkan sebagai "desentralisasi", eksistensinya di Negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD hampir setiap kabinet yang terbentuk di masa lalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya. Bahkan dalam masa Orde Baru, strategi bagi penyelenggaraan desentralisasi selalu tertuang dalam GBHN, sedangkan kebijakan dan programnya terjabar dalam Repelita Nasional. Ratusan peraturan perundang-undangan telah terbentuk dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Sejumlah sumber daya telah terserap untuk memperkuat program desentralisasi melalui serangkaian kajian dan penelitian. Masa kini desentralisasi merupakan salah satu agenda reformasi. Sungguh tidak keliru apabila dalam tahun limapuluhan **Maryanov** (1958) dari Universitas Cornell pernah menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa desentralisasi di Indonesia telah diterima sebagai aksioma. Lihat dala: **Maryanov, Gerald S**, *Decentralization in Indonesia: As Political Problem*, Cornell University Press: New York, 1958.

Sebagaimana dikemukakan **Hoessein**,⁵⁹ bahwa Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Realitas saat ini, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁶⁰

Terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan

⁵⁹ **Hoessein, B**, “*Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*”; Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

⁶⁰ **Marjoni Rachman**, *Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*, Jurnal Prediksi: Untag, Agustus Nomor: 7 Tahun 2008, hlm: 1-3.

ekonomis, dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasi; seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelola pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat, kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta.⁶¹

Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Oleh sebab itu reformasi paradigma

⁶¹ **Norman Flynn** (1990), pernah mengemukakan bahwasanya pelayanan publik yang dikelola pemerintah secara hierarkhis cenderung bercirikan *over bureaucratic, bloated, wasteful, dan under performing*. Lihat dalam: **Flyn Norman.**, *Public Sector Management*, Harvester Wheatsheaf, London, 1990. Kejadian-kejadian tersebut seperti yang disebutkan oleh **Norman Flynn**, lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani. Seharusnya, dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "*melayani, bukan dilayani*", "*mendorong, bukan menghambat*", "*mempermudah, bukan mempersulit*", "*sederhana, bukan berbelit-belit*", "*terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang*". Selanjutnya dapat dibaca dalam bukunya: **Mustopadidjaja AR**, *Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ceramah Perdana Pada Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN, Pemerintah Prov. Kaltim, dan Universitas Mulawarman, 15 Januari, 2002. Samarinda, 2002.

pelayanan publik tersebut harus dibarengi dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, dalam konteks otonomi daerah berarti bagaimana mereformasi pola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Mereformasi Pemerintahan Daerah.

Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi yang dikehendaki di dalam UU tersebut tergolong reformasi yang radikal (*radical change*) atau drastik (*drastic change*) dan bukan reformasi yang bersifat gradual (*gradual change*). Oleh karena itu, konflik, krisis dan goncangan yang menyertai reformasi tersebut lebih besar daripada serangkaian reformasi yang pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan dengan reformasi pemerintahan daerah di berbagai negara berkembang lainnya pun reformasi pemerintahan daerah di Indonesia masih tergolong sangat besar. Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia tergolong *big bang approach*.

Besarnya perubahan yang terjadi di dalam reformasi pemerintahan daerah tersebut dapat dilihat dari pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang terjadi. Paradigma "*structural efficiency model*" yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal (*local government*) ditinggalkan dan dianut paradigma "*local democracy model*" yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan itu terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi.⁶²

Namun perubahan sejumlah paradigma dan model tersebut tidak berakar pada strategi. Desentralisasi bukanlah tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam TAP MPR No. IV/2000 ditegaskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselerasan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah dan antar Daerah dalam kewenangan dan keuangan,

⁶² **Hoessein, B.**, "*Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*"; *Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah. Tujuan desentralisasi tersebut belum tertampung dalam strategi reformasi pemerintahan daerah yang digulirkan melalui kedua undang-undang tersebut. Oleh sebab itu berbagai tantangan dan permasalahan timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi tersebut.

Dalam konsep pelayanan publik saat ini, menurut **Hendarin**⁶³ dapat digambarkan sebagai adanya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Berikut adalah permasalahan yang dimaksudkan:

1. Permasalahan pertama dari segi *supply* adalah dengan semakin terbatasnya daya dukung alam dan sumber pembiayaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan di pihak lain tuntutan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
2. Permasalahan yang kedua, dari segi *demand* bahwa pemerintah daerah menghadapi permintaan yang terus menerus meningkat terhadap pemenuhan barang dan jasa publik, yang diartikan sebagai *urban services*. Transportasi massal, pengendalian banjir, dan pemeliharaan kebersihan atau lingkungan merupakan contoh *urban services* yang kebutuhannya semakin meningkat.

Kedua permasalahan tersebut merupakan fenomena *government growth* yang dihadapi banyak pemerintah daerah, jika fenomena ini tidak bisa diantisipasi secara tepat, maka proses pembangunan pun akan mengalami hambatan. Antisipasi yang dilakukan tersebut dimaksudkan demi tercapainya pemerintah yang mampu memberikan inovasi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

7. *Reinventing Government Management: Konsep Pelayanan Publik di era Moderen.*⁶⁴

Model *New Public Management* mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk

⁶³ **Marjoni Rachman**, *Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*, Op cit: 4-5.

⁶⁴ Untuk lebih memahami tentang konsep *Reinventing Governance Management* ini, dapat pembaca lihat dalam buku penulis yang berjudul: *Dimensi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Memberantas Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal*, CV. Maulana Media Grafika: Bandung, 2013, Hlm:505-506.

inkarnasi, misalnya munculnya konsep “*managerialism*”; “*market-based public administration*”; “*post-bureaucratic paradigm*”; dan “*entrepreneurial government*”.⁶⁵ *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era *New Public Management* adalah model pemerintahan yang diajukan oleh **Osborne** dan **Gaebler** (yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “*reinventing government management*”).⁶⁶ Untuk melakukan reformasi manajemen

⁶⁵**Osborne, David & Gaebler, T**, *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Reading, Massachusetts : A William Patrick Book, 1992.

⁶⁶**Osborne, David & Peter Plastrik**, *Banishing Bureaucracy : The Five Strategies for Reinventing Government*, Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1997. Menurut **Osborne** dan **Gaebler**, terdapat sepuluh prinsip *reinventing government management*, yaitu yang pertama adalah *pemerintahan katalis* yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah dan fungsi sebagai pelaksana. Kedua *pemerintah milik masyarakat*, yaitu mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki pemerintah ke tangan masyarakat. Ketiga, *pemerintah yang kompetitif*, yang mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Keempat, *pemerintah yang digerakkan oleh misi*, yaitu mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Kelima, *pemerintah yang berorientasi hasil*, yaitu pemerintah yang *result-oriented* mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada hasil. Keenam, *pemerintah berorientasi pada pelanggan*, yaitu pemerintah yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. Ketujuh, *pemerintahan wirausaha*, yaitu pemerintah yang berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Kedelapan, *pemerintah antisipatif*, yaitu pemerintah yang berupaya mencegah daripada mengobati. Kesembilan, *pemerintah desentralisasi*, yaitu pemerintah yang dijalankan dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Kesepuluh, *pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar*, yaitu pemerintah yang mampu mengadakan

pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dapat diupayakan melalui program *reinventing government management*. Pada dasarnya konsepsi mengenai *reinventing government management* bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat.

Untuk dapat melakukan reformasi manajemen pemerintahan, di Negara ini dapat menuri apa yang sudah dilakukan oleh **Bill Clinton** pada saat menjadi Presiden Amerika Serikat, yang mengemukakan pentingnya melihat empat prinsip yang menonjol dan perlu diperhatikan secara khusus, langkah tersebut adalah sebagai berikut: ⁶⁷

1. Memangkas penyakit birokrasi (*cutting rate tape*);
2. Menempatkan pelanggan sebagai fokus (*putting customer first*);
3. Memberdayakan pegawai untuk mencapai hasil (*empowering employes to get result*);
4. Melihat dan mengembalikan pada aspek fundamental (*cutting back to basic*).

Relevansi konsep *reinventing government management* terhadap upaya pengembangan aparatur dan mekanisme penyelenggaraan aparatur pemerintah daerah sangat banyak. Antara lain adanya komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, disertai perlu adanya visi dan misi yang jelas dari pimpinan untuk melakukannya. Dengan kekuatan visi dan misi yang dimiliki oleh pimpinan diharapkan mampu menyeimbangkan gaya dan pola manajemen dengan perubahan dan dinamika lingkungan yang semakin kompleks.

Hal lain yang sangat esensial dalam *reinventing government management* ini adalah berbagai mekanisme penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang seharusnya ditangani oleh pemerintah daerah secara bertahap dialihkan dengan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian keterbatasan pendanaan dan sebagainya dapat tertutupi dengan pola seperti ini.

8. Rekonstruksi Paradigma Pelayanan Publik.

perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

⁶⁷ **Al Gore**, *The Best Kept Secret In Government*, NPR, Washington, 1996.

Denhardt and Denhardt⁶⁸ mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen publik baru (*new public management*) dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (*new public service*) seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik

Aspek	Old Public Administration	New Public Manajemen	New Public Service
Dasar Teori	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
Konsep Kepentingan Publik	Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politik dan yang tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi dan kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dari agregasi dialog tentang berbagai nilai
Kepada Siapa Birokrasi harus Bertanggung jawab	Klien dan Pemilih	Pelanggan	Warganegara
Peran Pemerintah	Pengayuh (<i>rowing</i>)	Mengarahkan steering	Menegosiasikan dan mengelaborasi berbagai kepentingan warganegara dan kelompok komunitas
Akuntabilitas	Menurut hierarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan keinginan pelanggan	Multi aspek; akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar profesional, kepentingan warga negara

Dalam model *new public service*, berlandaskan teori demokrasi yang mengajarkan adanya *egaliter* dan persamaan hak diantara warga negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil

⁶⁸ **Marjoni Rachman**, *Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*, Op cit: 6-7.

dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari warga negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada. Dalam model ini birokrasi publik bukan hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma politik yang berlaku, standar profesional dan kepentingan warga negara. Itulah serangkaian konsep pelayanan publik yang ideal masa kini di era demokrasi.

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service* adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara. Dengan demikian karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Disamping itu pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan tanpa membedakan asal usul, suku, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam menerima layanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme. Model pelayanan publik seperti ini diharapkan dapat menjadi suatu model yang sesuai dengan harapan masyarakat.

D. Mengungkap Lemahnya Etika Pelayanan Publik.

Penulis merasakan kondisi birokrasi di Indonesia hingga saat ini belum efektif. Para birokrat di mata publik memiliki citra buruk dan cenderung korup. Mereka tidak dapat mengikuti situasi ekonomi, sosial, dan politik yang sedang berkembang yang menuntut adanya sikap

dinamis dan terbuka. Waktu dan biaya yang tidak terukur adalah cermin tidak profesionalnya kerja penopang birokrasi. Mereka masih melestarikan budaya birokrasi kolonial. Inilah budaya birokrasi kita saat ini yang jauh dari kesan melayani masyarakat. Perubahan kepemimpinan yang terjadi ditingkat nasional maupun daerah ternyata tidak mampu mendorong reformasi yang terarah dalam memperbaiki citra birokrat dan sistem birokrasi kita. Para pejabat politik baru pun harus berkonflik atau berkolusi di bawahnya karena dominasi mereka yang begitu kuat. Karenanya di era reformasi ini, perubahan pejabat politik di level nasional maupun daerah yang dimotori oleh partai politik baru dengan minimnya jaringan birokrasi, pasti selami mengalami resistensi tinggi.

Misi aparat birokrasi adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Pelayanan yang mengacu terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana tuntutan reformasi yaitu untuk mewujudkan *clean government* dalam penyelenggaraan negara yang didukung prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya.

Berdasarkan pengalaman penulis (yang juga sebagai birokrat), masih ada aparat birokrasi yang mengabaikan pekerjaan melayani, yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Hal itu, terlihat dari birokrasi sedang berada dan bekerja pada lingkungan yang hirarkis, birokratis, monopolis, dan terikat oleh *political authority*.⁶⁹ Keadaan ini yang membuat birokrasi menjadi membudaya yang *rigid / kaku*, ada di lingkungan yang hanya sebatas *following the instruction* atau mengikuti instruksi. Juga dikarenakan ada di dalam *tightening control* atau mengencangkan kendali, maka birokrasi menjadi tidak memiliki inisiatif dan kreativitas.

Kondisi tersebut menjadi isu umum budaya birokrasi yang menginginkan balas jasa, yakni budaya dan mental birokrat tersebut kontradiktif dengan pelayanan yang terkait untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good and clean government*, dan kurang menempatkan

⁶⁹ Nanik Pujiastuti, *Lemahnya Etika Pelayanan Publik di Dalam Birokrasi*, Jurnal Prediksi: UNTAG, 2008, hlm: 12.

masyarakat sebagai orang yang dilayani, dan justru sebaliknya. Selanjutnya birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan (*public service, development and empowering*). Akibatnya menjadikan birokrasi sebagai lembaga yang tambun sehingga mengurangi kelincahannya.

Bureaucratism berdasarkan laporan World Competition Report Indonesia menduduki ranking 31 dari 48 negara. Dalam laporan tersebut Indonesia termasuk tinggi tingkat korupsinya. Selanjutnya, ada juga mengenai pelayanan aparatur birokrasi untuk negara berkembang, di dalamnya termasuk Indonesia. Faktor buruknya pelayanan aparat birokrasi disebabkan oleh: Gaji rendah (56%), Sikap mental aparat pemerintah (46%), Kondisi ekonomi buruk pada umumnya (32%), Administrasi lemah dan kurangnya pengawasan (48%), dan lain-lain (13%). Persentase lebih dari 100% disebabkan ada respons ganda dari responden. Dengan demikian, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di Indonesia.⁷⁰

Kata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dalam rangka development, yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Kita semua tidak menutup mata, bahwa situasi telah berubah, dunia sudah mengglobal, sistem dan nilai pun berubah dan juga berkembang. Era globalisasi menyentak kita melakukan penyesuaian dan pemikiran yang strategis. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization. Arah yang akan dicapai reformasi adalah, efficiency, effectiveness, dan responsiveness concern in their administrative system. **Khan** (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Sedangkan **Quah** (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Dari pengertian

⁷⁰Agus Bando, *Lemahnya Etika Pelayanan Publik didalam Birokrasi*, Universitas Djuanda, Bogor, 2002.

ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku (*the ethics being*). Hal ini, berarti menyangkut permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).

Oleh karena itu, maka harus ditekankan hal-hal sebagai berikut dalam mereformasi birokrasi pemerintahan:

1. Perlu pemikiran pembenahan dan pengembalian fungsi dan misi birokrasi kepada konsep, makna, prinsip yang sebenarnya;
2. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik (*public service*). Dengan demikian, birokrasi akan menjadi lebih lincah dan jelas kinerja atau performancenya. Tidak saja kinerja organisasi atau lembaganya tetapi juga memudahkan untuk membuat performance indicators dari masing-masing aparat atau birokrat;
3. Untuk itu, perlu adanya kebijakan presiden melalui political will melakukan reformasi di bidang birokrasi, dengan melepaskan birokrasi dari fungsi dan tugas dan misi sesungguhnya tidak termasuk dalam kewenangannya;
4. Tetapi juga untuk melepaskan birokrasi sebagai alat politik (netralitas), serta membebaskan birokrasi untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customer's oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat.

Birokrasi dan Pelayanan Publik Pro-kontra revisi UU No.22 Tahun 1999 telah mencuat menjadi wacana publik. Disinyalir pelaksanaannya dapat melahirkan disintegrasi bangsa, kurang terkontrolnya daerah, serta provinsi dan pusat menjadi *powerless*. Namun sayangnya, hal-hal yang bersifat teknis luput dari perhatian. Dalam menyongsong otonomi daerah setidaknya ada 4 hal teknis yang perlu dipersiapkan yakni 4 P: pembiayaan, prasarana, partisipasi masyarakat, dan personil.

Penyiapan SDM baik kuantitas dan kualitas (pendidikan, ketrampilan, mental) harus dilakukan. Keempat hal teknis tersebut lupa dipersiapkan, sehingga implementasi dari UU tersebut menjadi sedikit kacau. Penggalan dan pembangunan 4 P dapat dilaksanakan dengan baik dan perlu adanya prasyarat sistem birokrasi yang sehat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menyoroti aspek sistem birokrasi di daerah yang perlu dibenahi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem birokrasi kita tidak jelas, dan cenderung menjadi lembaga politik ketimbang lembaga administratif. Sehingga birokrasi menjadi lembaga upeti, minta dilayani- bukan sebaliknya yang seharusnya melayani publik. Untuk itu, refleksi kesejarahan birokrasi dapat dijadikan tonggak, bagaimana sistem birokrasi tersebut harus dibentuk. Birokrasi menurut Martin Albrow digunakan sejak tahun 1745 oleh Vincent de Gounnay untuk menerangkan pemerintahan Prusia. Birokrasi lahir tepat pada waktunya, tatkala pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman dan kemudian upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menempati prioritas pertama. Penerangan konsep ini berlangsung secara luas dan berkembang di negara industri di Eropa dan Amerika. Birokrasi yang secara etimologis berarti 'kekuasaan di belakang meja' atau meminjam definisi Lance Castle adalah "orang-orang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan". Dalam kacamata awam birokrasi adalah aparat pemerintah (pegawai negeri), yang dalam jargon Korpri sebagai abdi negara (yang melayani negara) bukan sebagai abdi rakyat (*civil servant*) yang melayani masyarakat. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai *government by bureaus*, yaitu pemerintahan biro oleh personil yang diangkat oleh penguasa. Kadangkala birokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang kaku, macet, dan segala tuduhan yang negatif terhadap instansi yang berkuasa (*red tape*).

Rasanya kurang afdol kalau kita membahas birokrasi tanpa menyinggung Weber. Walaupun sesungguhnya Weber secara eksplisit tidak mendefinisikan birokrasi. Birokrasi rasional oleh Weber dibebankan dengan birokrasi patrimonial. Pada pengertian pertama, birokrasi yang dimaksud memisahkan secara tajam antara kantor dan si pemegang jabatan, kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematis antara kedudukan, serta hak dan kewajiban yang diatur dengan tugas. Sedangkan birokrasi patrimonial, kedudukan dan tingkah laku seluruh hirarki sebagian besar bergantung pada hubungan personal-kekeluargaan atau *patront-client*. Birokrasi yang paling rasional terlebih dahulu mempersyaratkan proposisi-proposisi menurut legitimasi dan otoritas, serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka.
2. Ada hirarki jabatan jelas.

3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.
4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.
5. Mereka dipilih dengan kualifikasi profesional.
6. Memiliki gaji dan pensiun.
7. Pos jabatan adalah lapangan kerja pokoknya.
8. Terdapat struktur karir dan promosi atas dasar merit sistem dan keunggulan.

Apa yang dikemukakan Weber tentang birokrasi rasional merupakan lembaga administratif belaka. Secara fungsional birokrasi dalam suatu negara diperlukan dan berguna memperlancar urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Birokrasi mendapat konotasi positif. Sedangkan menurut pandangan Marx, *The bureaucracy had eventually become a caste which claimed to possess, through higher education, the monopoly of the interpretation of the state's interests.* Style birokrasi pada masa Orde Baru mirip dengan sinyalemen Marx di atas, yang memonopoli interpretasi atas kebenaran, ideologi, dan simbol-simbol negara. Meminjam istilah Karl D.Jackson model birokrasi Orde Baru disebut *bureaucratic polity* yang salah satu cirinya adalah bahwa suasana politik menentukan diri dan otonom *vis a vis* lingkungan domestik. Politik terwujud sebagai persaingan antara lingkaran birokrat-birokrat tingkat tinggi berpangkat tinggi dan perwira-perwira militer. Kepolitikan birokrasi ini menurut Crouch dicirikan oleh 3 hal, yaitu lembaga politik yang dominan adalah birokrasi ; Parlemen, parpol, kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah tanpa mampu mengontrol birokrasi ; massa di luar birokrasi secara politik adalah pasif.

Apa yang dikemukakan oleh Jackson dan Crouch di atas, tidak terlepas dari strategi Soeharto dalam mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun dengan jalan mengkooptasi kekuatan nonnegara berada dalam kontrol dirinya melalui legitimasi UU, pengebirian UUD 45, Keppres, serta mengucilkan dan menjebloskan kelompok oposan. Sehingga monopoli kekuasaan berada di tangannya. Kekuasaan Soeharto dan birokrasi selama 32 tahun tanpa terkontrol, hasilnya adalah kasus mega KKN serta, mental aparat yang bobrok.

Setelah kita bicara birokrasi secara *makro-politis*, maka kini kita akan membicarakan secara *mikro-administratif*, yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Telah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan

umum di instansi pemerintah selama ini lamban, ruwet, tidak efisien, dan bahkan menjengkelkan karena banyak calo yang berkeliaran. Kita lihat di samsat, di loket stasiun misalnya, calo yang ada tidak pernah bisa diberantas, malahan dilindungi karena mendatangkan *fulus*. Hal ini memberi kesan bahwa birokrasi kita adalah ibarat 'benang kusut', akibatnya masyarakat enggan berhadapan dengan birokrasi. Inilah sebuah paradoks birokrasi kita, yang justru tidak mendinamisasi masyarakat. Maka pelayanan publik sebagai fungsi utama Birokrasi mendesak untuk dibenahi dan disertai dengan *law enforcement* yang tegas.

Sekadar untuk menengok pelayanan publik secara formal, maka menurut keputusan Menpan nomor 81/1993 pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. pelayanan publik menuntut tata laksana, prosedur kerja, tata kerja, sistem kerja, wewenang, biaya, dll. Secara ideal pelayanan umum yang dilaksanakan harus sedapat mungkin mendorong kreativitas, prakarsa, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hubungan aparat dengan masyarakat yang *patront-client* harus diubah menjadi hubungan produsen-konsumen, atau *govenrment-citizen* di mana masyarakat merupakan *primary stakeholder*.

Tuntutan masyarakat sejalan dengan demokratisasi dan perkembangan teknologi, maka pelayanan publik dituntut lebih efisien, serba cepat, computerised, transparansi, komunikatif. Birokrasi modern mengemban misi *fairer, faster, better and cheaper*. Untuk ke arah itu sistem harus dibenahi, dituntut aparat yang mempunyai *skill* yang memadai, ramah, berpengetahuan luas, serta ditunjang alat yang canggih. Tanpa itu semua sulit rasanya birokrasi kita mengantisipasi tuntutan pelayanan publik masa-masa mendatang.

Birokrasi kita perlu mengubah orientasi dari 'dilayani' ke 'melayani' demikian pula orientasi negara perlu diubah dari '*beamstenstaat*' ke '*peoplestate*'. David Osborn dan Ted Gaebler dalam "*Reinventing Government*" menyarankan adanya perubahan orientasi pemerintahan di antaranya: pemerintahan lebih bertindak sebagai pengarah daripada pelaksana, memberdayakan masyarakat untuk melayani diri daripada memonopoli pelayanan, berorientasi pada hasil

ketimbang *input*, lebih mementingkan kebutuhan masyarakat luas ketimbang birokrasi, menyesuaikan dengan perubahan tuntutan pasar, desentralisasi diperluas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Perubahan orientasi itu perlu bahkan harus, agar birokrasi kita mampu menghasilkan *public good* dan *public interest* atau *high quality public goods and service*.

Kalau orientasi birokrasi tidak berubah, maka akan timbul ekses-ekses seperti '*immobilism-inability*' to *functio*' (hambatan dan ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi secara efektif) '*takenism*' (pernyataan sikap mendukung secara terbuka, tetapi sesungguhnya hanya melakukan partisipasi minimal dalam pelaksanaannya), maupun '*procrastination*' (bentuk partisipasi dengan kualitas pelayanan diturunkan). Dalam realitasnya pemberian pelayanan oleh Pemda kepada masyarakat cenderung birokratis, dan inefisiensi. Jumlah personil birokrasi "*unskilled over loaded*". Fenomena tersebut menimbulkan beberapa masalah yang berkenaan dengan pelayanan publik, di antaranya:

1. Masalah akuntabilitas pelayanan publik.
2. Masalah pilihan penyedia pelayanan (*choices*).
3. Pengadaan pelayanan yang kompetitif.
4. Desentralisasi manajemen.
5. Kualitas Pelayanan

Dari tataran teoritik di atas, maka ada beberapa isu pokok yang dapat dijadikan agenda dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, yakni; Identifikasi dan standarisasi pelayanan pemda; Peningkatan kinerja pelayanan pemda; Peningkatan akuntabilitas pemda dalam pelayanan, serta; Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan.

